

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Dessy Meilina Suryarini

No Mahasiswa : 17312116

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Dessy Meilina Suryarini

No. Mahasiswa: 17312116

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah orang lain ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Ambarawa, 28 Juli 2021

Penulis,



Dessy Meilina Suryarini

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Dessy Meilina Suryarini

No. Mahasiswa: 17312116

**SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK
DIAJUKAN**

27 Juli 2021

Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)

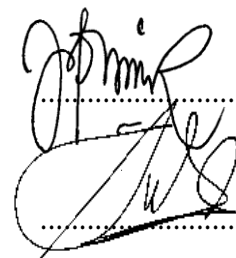
Disusun oleh : DESSY MEILINA SURYARINI

Nomor Mahasiswa 17312116

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 01 September 2021


Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Suwaldiman, M.Accy., Ak., CMA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi*

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”

(QS. Ali-Imran: 139)

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali
kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

(Q.S. Ar Ra'du: 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahrabbi“aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)”** Penyusunan skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk mencapai kelulusan jenjang Pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik berkat dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

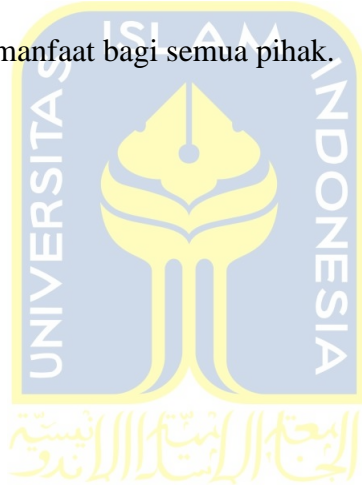
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya dan petunjuk serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.

3. Kedua orang tua Bapak Supriyadi dan Ibu Kunti yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran, dan nasihatnya. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala perjuangan dan doa Bapak Ibu.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi serta selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. CA.MCA., Dr. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
9. Kepada kakak tercinta Inna Latifah Rahmawati yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat.
10. Keponakan kesayangan Danish Arsyad Dewantara dan Naufal Zayyan Dewantara yang selalu menjadi penyemangat.
11. Kekasih tercinta Ian Adrian Pradana yang selalu menampung segala keluh kesah, selalu memberi semangat, doa, dan selalu ada saat sedih maupun senang agar penulis yakin dan mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2017.

13. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran kearah perbaikan sangat diperlukan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.



Ambarawa, 27 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dessy', is written over the printed name.

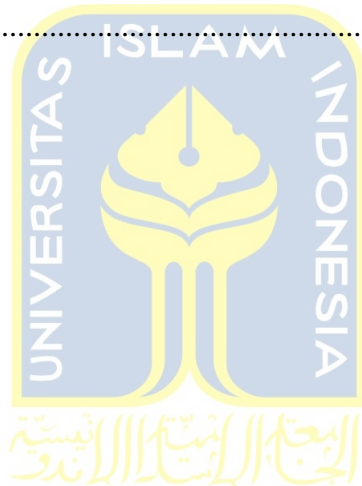
Dessy Meilina Suryarini

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Institusional	11
2.1.2 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan	15
2.1.3 <i>Intergovernmental Revenue</i>	17
2.1.4 Ukuran Legislatif.....	18
2.1.5 Jumlah Penduduk	19
2.1.6 Pelatihan Pengelolaan Keuangan	20
2.1.7 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	20
2.1.8 Umur Administratif Pemerintahan	21
2.1.9 Temuan Audit.....	21
2.2 Penelitian terdahulu.....	22
2.3 Hipotesis penelitian.....	25
2.3.1 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa.....	25

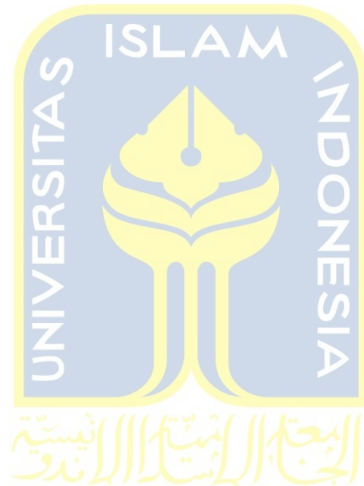
2.3.2	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa.....	26
2.3.3	Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa.....	27
2.3.4	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa.....	28
2.3.5	Pengaruh Umur Administratif Pemerintahan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa.....	30
2.3.6	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa.....	31
2.4	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Populasi dan sampel.....	34
3.2	Metode pengumpulan data.....	36
3.3	Variabel penelitian.....	36
3.3.1	Variabel Dependen.....	37
3.3.2	Variabel Independen.....	38
3.3.3	Variabel kontrol.....	42
3.4	Metode analisis data.....	43
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	43
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.4.3	Analisa regresi Linier Berganda.....	45
3.4.4	Koefisien Determinasi.....	46
3.4.5	Uji T.....	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	47
4.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.1	Uji Normalitas.....	52
4.2.2	Uji Multikolinearitas.....	53
4.2.3	Uji Heterokedastisitas.....	55
4.3	Analisis Regresi Berganda.....	56
4.4	Koefisien Determinasi.....	58
4.5	Uji Hipotesis.....	59
4.6	Pembahasan.....	62
4.6.1	Pengaruh Jumlah Anggota Dprd Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	63

4.6.2	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	64
4.6.3	Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	66
4.6.4	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	67
4.6.5	Pengaruh Umur Administratif Pemerintahan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.6.6	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	Simpulan	73
5.2	Saran	75
Daftar Pustaka		77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	41
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas.....	54
Tabel 4.3 Analisis Regresi Berganda.....	56
Tabel 4.4 Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.5 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	68



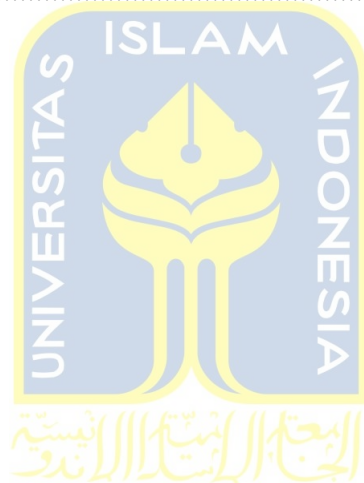
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	33
Gambar 4.1 Uji Normalitas	53
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	82
Lampiran 2	103
Lampiran 3	106
Lampiran 4	109
Lampiran 5	112
Lampiran 6	115
Lampiran 7	118
Lampiran 8	121
Lampiran 9	124
Lampiran 10	127



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Populasi dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 110 sampel LKPD. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS 25. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD di pulau jawa pada tahun 2018 sebesar 70%. Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan, ukuran legislatif, jumlah penduduk, pelatihan, latar belakang pendidikan kepala daerah, dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Kata kunci: tingkat pengungkapan wajib, Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), umur administratif pemerintah daerah, ukuran legislatif, jumlah penduduk, pelatihan, latar belakang pendidikan kepala daerah, dan temuan audit.



ABSTRACT

This research aims to determine the factors that influence the level of mandatory disclosure of Regional Government Financial Reports (LKPD). The population in this study is the financial statements of the district and city governments on the island of Java in 2018. The sampling method used in this study is the purposive sampling method. The number of samples used was 110 LKPD samples. The data analysis method used is multiple regression analysis with the SPSS 25 program. The analysis that has been carried out shows that the average level of mandatory disclosure of LKPD on the island of Java in 2018 is 70%. The administrative age of the local government has a significant positive effect on the level of mandatory disclosure of LKPD. Meanwhile, legislative size, population, training, educational background of regional heads, and audit findings do not affect the level of mandatory disclosure of LKPD.

Keywords: level of mandatory disclosure, Regional Government Financial Reports (LKPD), administrative age of the local government, legislative size, population, training, educational background of regional heads, and audit findings.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Peralihan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyatakan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, adanya perubahan ini menuntut pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerah otonom agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prosedur didalam sebuah instansi yang diberlakukan dengan tujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada operasionalnya (Maulana & Handayani, 2015). Sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya maka pemerintah daerah harus menyampaikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selambat-lambatnya menyampaikan laporan keuangan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada penyusunan laporan tersebut sangat dipelukannya suatu standar untuk menjadi pedoman dan petunjuk. Laporan keuangan yang disusun pemerintah harus sesuai standar akuntansi pemerintahan yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang berisikan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Amaliah dan Haryanto (2019) bukan hanya sebagai bentuk nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan juga memiliki tujuan sebagai sarana bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan.

Setelah laporan keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terlebih dahulu diperiksa oleh BPK sebelum diberikan kepada DPRD atau dipublikasikan. Hasil dari pemeriksaan BPK akan menghasilkan sebuah opini yang menggambarkan tingkat kewajaran informasi keuangan dari suatu laporan keuangan.

Pada Laporan keuangan terdapat pengelompokan pengungkapan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan pertaturan yang berlaku. Sedangkan, *Voluntary disclosure* yaitu pengungkapan informasi selain pengungkapan wajib (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Pada beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Indonesia, antara lain oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dengan data tahun 2008-2009 sebesar 52,09%, kemudian budiarto dan Indarti (2019) dengan data tahun 2015-2017, menunjukkan hasil rata-rata pengungkapan sebesar 52%. Sedangkan penelitian pengungkapan LKPD provinsi oleh

Khasanah dan Rahardjo (2014) dengan data tahun 2010-2012 menunjukkan sebesar 59.9%, Hendrayani dan Tahar (2014) dengan data tahun 2012-2014 menunjukkan hasil sebesar 41,6%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan wajib yang masih rendah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami pentingnya pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti telaah faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah, yaitu: ukuran legislatif dan usia pemerintahan (Setyaningrum & Syafitri, 2012), jumlah penduduk (Hendriyani & Tahar, 2015), temuan audit (Ridwan & Yahya, 2020), dan latar belakang pendidikan dan pelatihan (Muzahid, 2014).

Pada pemerintahan Indonesia, peran sebagai badan legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPRD sebagai wakil dari masyarakat mempunyai fungsi pengawasan. Fungsi tersebut memantau kinerja pemerintahan supaya selalu sejalan dengan kepentingan rakyat dan memantau pelaksanaan serta pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga, jumlah anggota DPRD yang banyak akan memacu Pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Jumlah penduduk ialah suatu pengukuran yang memberikan gambaran terhadap kompleksitas sesuatu wilayah. Artinya semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah menjadikan wilayah tersebut semakin

kompleks (Hendriyani & Tahar, 2015). Sehingga, jumlah penduduk yang besar akan memerlukan berbagai macam sarana publik yang diperlukan guna memenuhi tuntutan masyarakat. Sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah memiliki kewajiban pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai perwujudan kewajiban tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengungkapkan semua informasi pada laporan keuangan dapat secara akuntabel dan transparan.

Pelatihan yaitu proses pendidikan yang memuat praktik-praktik pembelajaran yang spesifik dan keterampilan yang akan diterapkan pada pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan berlangsung dalam jangka pendek. Bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pelatihan juga dapat dilakukan diluar kota/ daerah dengan tujuan sebagai penyegaran dan menambah wawasan tentang penyusunan laporan keuangan pada daerah lain yang telah maju atau memiliki laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik (Muzahid, 2014).

Faktor selanjutnya latar belakang Pendidikan kepala daerah. Sebagai pemangku kekuasaan yang mengelola keuangan daerah, membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan menjadi kewajiban kepala daerah. Sehingga, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akan lebih mudah disusun oleh kepala daerah dengan latar belakang ekonomi ataupun akuntansi (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Oleh karena itu, latar belakang

pendidikan akuntansi dapat menunjang kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan (Muzahid, 2014).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Waliyyani dan Makhmud (2015) menyatakan bahwa semakin lama pemerintah daerah telah berdiri maka informasi yang dimiliki akan lebih banyak dari pada Pemerintah Daerah yang belum lama berdiri. Selain itu, Pemerintah daerah yang telah lama berdiri akan lebih mempunyai pengalaman sehingga selalu berusaha mengoreksi kesalahan yang pernah terjadi dengan melihat hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI di tahun anggaran sebelumnya. Kemudian akan berupaya melakukan perbaikan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Temuan audit badan pengawas keuangan (BPK) ialah kasus atau pelanggaran yang ditemukan BPK didalam laporan keuangan pemerintah daerah terhadap terhadap syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang (Amaliah & Haryanto, 2019). Saat BPK menemukan banyak temuan audit yang menggambarkan ketidaksesuaian dengan peraturan atau pedoman, maka mengindikasikan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang buruk. Dengan kata lain, baik buruknya kinerja suatu oragnisasi pemerintahan daerah dapat dilihat dari jumlah temuan audit yang dilaporkan BPK (Masdiantini & Erawati, 2016). Semakin sedikit jumlah temuan audit maka penyusunan laporan keuangan semakin patuh pada syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang. Sehingga, semakin sedikit jumlah temuan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang disajikan.

Namun, terdapat ketidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014); Simbolon dan Kurniawan (2018) menyatakan bahwa ukuran legislatif dan usia pemerintahan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, Budiarto dan Indarti (2019) menyatakan bahwa semakin lama pemerintahan berdiri membuat tingkat pengungkapan wajib semakin rendah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khasanah (2014); Hendriyani (2015); Waliyyani (2015) mengungkapkan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Amaliah dan Haryanto (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk juga tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang terakhir yaitu tingkat pendidikan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Setyaningrum (2012) dan Simbolong (2018).

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan pada pemilihan variabel independen. Peneliti menambahkan latar belakang pendidikan kepala daerah, pelatihan, serta jumlah penduduk sebagai variabel independen dan *intergovernmental revenue* sebagai variabel kontrol. Penambahan variabel kontrol pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan bias yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar karakteristik daerah (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2010). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Kabupaten dan kota di Pulau Jawa dengan tahun anggaran

2018 sebagai objek penelitian. Alasan memilih Pulau Jawa sebagai objek penelitian yaitu di Pulau Jawa terdapat Ibu Kota Indonesia sehingga dapat mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya dalam mendapatkan fasilitas infrastruktur yang lebih memadai. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) enam provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki nilai di atas rata-rata. Menurut Arifin, Tower & Porter (2013) menyatakan bahwa kualitas telekomunikasi dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada suatu entitas. Suatu organisasi dapat lebih mudah melihat perkembangan organisasi yang berkaitan dengan operasional dapat dibagikan kepada semua pemangku kepentingan lebih cepat agar mendukung kemajuan organisasi tersebut karena adanya sistem komunikasi yang lebih baik. Kemudian, menurut Mene et al. (2018) ketersediaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pengolahan data akuntansi serta menunjang akurasi dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan, uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan teori institusional terhadap variabel independen: ukuran legislatif dan jumlah penduduk sebagai *coercive isomorphism*, pelatihan sebagai *mimetic isomorphism*, latar belakang pendidikan kepala daerah, umur pemerintahan, dan temuan audit sebagai *normative isomorphism* dengan variabel dependen tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan *intergovernmental revenue* sebagai variabel kontrol. Latar belakang pemilihan

intergovernmental revenue sebagai variabel kontrol karena pada penelitian terdahulu secara konsisten dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang konsisten ini dikemukakan oleh: Setyaningrum dan Syafitri (2012); Hendrayani dan Tahar (2015); Simbolon dan Kurniawan (2018); Amaliah dan Haryanto (2019). Peneliti mengambil judul **“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pelatihan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah umur pemerintahan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan kepala daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa.
2. Mengetahui pengaruh ukuran legistaif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa.
3. Mengetahui pengaruh pelatihan pengelolaan keuangan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa.
4. Mengetahui pengaruh umur pemerintahan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa.
5. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa.
6. Mengetahui pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah di Pulau Jawa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang mungkin didapat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa, dengan

harapan dapat membantu memperkuat penelitian sebelumnya dan membantu penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah guna membantu pemerintah mengenai pentingnya kesesuaian pengungkapan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang penjelasan dari teori yang akan digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang analisis data, pengujian data, penjelasan mengenai hipotesis, dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisis dan pembahasan dari bab iv dan saran bagi pemerintah maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Institusional

Teori institusional merupakan salah satu teori yang sering digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan lingkungan sebuah organisasi (Pramesti, Prayudi, & Wahyuni, 2018). Teori ini menekankan bahwa organisasi dapat terbentuk karena adanya tekanan institusional yang menimbulkan terjadinya institusionalisasi (Pandansari, 2016). Dengan demikian, organisasi publik yang lebih mengutamakan legitimasi dapat terbentuk dari lingkungan institusional karena organisasi tersebut akan berusaha untuk menyesuaikan diri (*isomorphism*) pada lingkungan dimana dia berada (DiMaggio & Powell, 1983).

Terdapat banyak teori yang telah digunakan untuk memprediksi determinan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah

daerah. Namun, teori institusional yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983) ini mempunyai kelebihan dalam memprediksi determinan tersebut karena teori ini lebih lengkap dan terperinci. Alasan teori ini lebih lengkap dan rinci karena memiliki tiga pandangan perubahan yang mendorong organisasi untuk melakukan penyesuaian dengan lingkuannya. Pandangan pertama, *coersive isomorphism* adalah tekanan dari organisasi lain dengan “paksaan” oleh organisasi lain yang memiliki kekuasaan lebih besar. Kedua, *mimetic isomorphism* yaitu proses dimana organisasi mengikuti organisasi lain yang sukses pada suatu bidang. Ketiga, *normative isomorphism* kerap diartikan sebagai kelompok profesional berperan memperjuangkan suatu praktik tertentu yang timbul pada bidang tersebut. Norma atau standar yang tepat bagi organisasi berasal dari pendidikan formal pada bidang tertentu yang mendorong tersebarnya kepercayaan normatif itu.

Pada pemerintahan Indonesia, peran sebagai badan legislatif diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil dari masyarakat mempunyai fungsi pengawasan. Dalam teori institusional DPRD berperan sebagai *coersive isomorphism* yaitu tekanan dari eksternal menekan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Jumlah penduduk juga berperan sebagai *coersive isomorphism* karena semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah menjadikan wilayah tersebut semakin kompleks. Sehingga, jumlah penduduk yang besar akan memerlukan berbagai macam sarana publik yang diperlukan

guna memenuhi kepuasan publik, diharapkan pemerintah daerah berupaya mengungkapkan segala informasi pada laporan keuangan.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pegawai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan diharapkan dapat mengasah kemampuan sehingga pegawai yang melaksanakan pelatihan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan agar memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah. Perubahan akibat adanya kegiatan pelatihan ini yang disebut *mimetic isomorphism*.

Umur administratif pemerintah termasuk *normative isomorphism* karena pemerintah daerah yang lebih lama berdiri semakin mahir dan memiliki kompetensi yang lebih baik agar laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pada latar Pendidikan kepala daerah juga merupakan *normative isomorphism* karena kepala daerah yang terpilih berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan (Pratiwi & Aryani, 2016). Sehingga, kepala daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi maupun ekonomi lebih berkompentensi mengenai pemahaman dan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Temuan audit merupakan *normative isomorphism*. Pada penelitian yang di lakukan oleh dalam Arifin, Tower, & Porter (2013) menyatakan bahwa unsur tekanan pada *normative isomorphism*

dikembangkan oleh kelompok profesional dan pekerjaan. Dalam hal ini, temuan audit berasal dari hasil dari pemeriksaan BPK yang mana merupakan kelompok professional yang memiliki fungsi sebagai pengawas kewajaran sebuah laporan keuangan agar sesuai dengan SAP. Temuan audit pada laporan keuangan dapat berisi mengenai kecurangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Budiarto & Indarti, 2019). Semakin sedikit jumlah temuan audit maka penyusunan laporan keuangan semakin patuh pada syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang. Sehingga semakin sedikit jumlah temuan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang disajikan. Berdasarkan, tiga proses upaya perubahan tersebut dapat mendorong pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dalam hal pengungkapan informasi keuangan dengan tujuan mendapatkan legitimasinya dari pemangku kepentingan (Lestari & Rahardjo, 2020).

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan berisi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang disajikan secara terstruktur (Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Laporan keuangan pemerintah daerah wajib disampaikan kepada DPRD sesuai Pasal 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan akan terlebih dahulu diperiksa oleh BPK sebelum diberikan kepada DPRD. Laporan

keuangan disampaikan selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tujuan dari laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Dalam laporan keuangan juga harus menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan sebuah entitas dalam kegiatan operasionalnya yang bertujuan sebagai dasar penilaian kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas. Sehingga, dari informasi tersebut pengguna laporan keuangan dapat mengetahui posisi keuangan dan semua transaksi selama satu periode pelaporan di suatu entitas. Tujuan lainnya yaitu sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja dan aktivitas sebuah entitas untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan tersebut.

Komponen laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Sehingga, kondisi keuangan pada suatu entitas dapat dijelaskan menggunakan laporan keuangan dalam periode tertentu yang memberikan gambaran pos-pos keuangan pada entitas tersebut (Kasmir & Lainnya, 2013).

2.1.2 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) diartikan sebagai pemaparan informasi yang dituangkan dalam pelaporan keuangan. Dalam pengungkapan pelaporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang mencukupi agar dapat bermanfaat seluas-luasnya (Hidayanti & Sunyoto, 2012). Oleh karena itu, informasi dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah harus memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai kejadian-kejadian ekonomi pada entitas tersebut. Agar informasi yang diberikan tidak membingungkan maka dibuatlah sebuah pedoman untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengungkapan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Ghozali & Chariri, 2019). Pengungkapan wajib berarti pemerintah daerah maupun pusat memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan batas minimum mengenai informasi apa saja yang harus diungkapkan. Sedangkan, pengungkapan sukarela yaitu informasi tambahan yang diungkapkan selain pengungkapan wajib (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan diungkapkan dengan pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yang ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa CaLK mengungkapkan atau menyediakan hal-hal seperti informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi mengenai kebijakan fiscal dan ekonomi makro, ikhtisar penjapaian target dan hambatan yang dihadapi, informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kejadian penting yang terjadi, penjelasan dan rincian pos-pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, dan informasi lainnya yang wajar namun tidak disajikan pada lembar muka.

Pengungkapan atas informasi tersebut merupakan suatu komponen dasar dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, sangat penting suatu entitas untuk menyajikan laporan keuangannya.

2.1.3 *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue atau dana perimbangan merupakan dana yang pemerintah daerah terima dari pemerintah pusat sebagai perwujudan desentralisasi (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan terbagi menjadi tiga bagian yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dan alokasi khusus.

Tujuan dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki tujuan sebagai pengurang ketimpangan kemampuan ekonomi dan membiayai kebutuhan khusus daerah seperti membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dengan cara sistem transfer dana dari Pemerintah pusat ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat dapat dilihat dari *intergovernmental revenue* yang tinggi. Sehingga, pemerintah daerah akan merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana sebagai upaya untuk meingkatkan kepercayaan pemerintah pusat akan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang berlaku (Maulana & Handayani, 2015).

2.1.4 Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif ini merupakan

bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Simbolon & Kurniawan, 2018). Salah satu fungsi dari DPRD ialah fungsi pengawasan (Amalia, 2013).

Fungsi pengawasan dilakukan dengan tujuan supaya pemerintah daerah dapat mendistribusikan dan menggunakan anggaran sebagaimana mestinya. Menurut Setyaningrum & Syafitri (2012) DPRD juga bertugas untuk meminta laporan pertanggungjawaban bupati dan walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota, kemudian memberikan izin atas rencana kerja sama dengan pihak ketiga atau dengan daerah lain, dan mengusahakan terpenuhinya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Faizal, 2011).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar semakin baik kualitas laporan keuangan.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua warga yang selama lebih dari enam bulan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Penduduk juga dapat diartikan sebagai warga negara yang bertujuan untuk menetap meskipun kurang dari enam bulan (Budiarto & Indarti, 2019).

Besarnya kebutuhan akan ketersediaan layanan publik juga dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk. Mengingat fungsi pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat maka semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar pula tuntutan kepada pemerintah terhadap pengungkapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah (Pandansari, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi terkait keuangan daerah. Informasi tersebut oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa informasi keuangan daerah diakses dengan mudah oleh masyarakat

2.1.6 Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Pelatihan yaitu proses pendidikan yang memuat praktik-praktik pembelajaran yang spesifik dan keterampilan yang akan diterapkan pada pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan berlangsung dalam jangka pendek. Bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pelatihan juga dapat dilakukan diluar kota/ daerah dengan tujuan sebagai penyegaran dan menambah wawasan tentang penyusunan laporan keuangan pada daerah lain yang telah maju atau memiliki laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik (Muzahid, 2014).

2.1.7 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Meningkatkan dan mendapatkan kemampuan profesional pada setiap orang merupakan peranan penting dari Pendidikan. Oleh karena itu, agar seseorang dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan dihadapi seseorang harus dibekali dengan Pendidikan untuk mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimiliki (Sedarmayanti, 2012).

Sebagai pemangku kekuasaan kepala daerah diwajibkan mengelola keuangan daerah, membuat dan menyampaikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun ekonomi akan lebih mudah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan dengan begitu laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para penggunanya (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

2.1.8 Umur Administratif Pemerintahan

Umur pemerintah daerah didefinisikan dengan berapa lama daerah tersebut telah ada. Umur administratif pemerintah daerah dihitung berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan daerah tersebut. Semakin lama pemerintah daerah tersebut berdiri semakin mahir pemerintah daerah tersebut dalam menyesuaikan menyajikan laporan keuangannya dengan standar keuangan pemerintahan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

2.1.9 Temuan Audit

BPK merupakan lembaga pengawas keuangan negara yang bertugas memeriksa kinerja, keuangan, serta pemeriksaan lain dengan tujuan tertentu. Kemudian dari pemeriksaan tersebut BPK akan melaporkan berupa opini, temuan, simpulan, dan dapat juga berupa rekomendasi (Hendriyani & Tahar, 2015).

Pelanggaran peraturan perundangan-undangan yang berlaku biasa menjadi temuan dalam laporan audit. Pelanggaran atau ketidakpatuhan inilah yang mungkin akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan. (Budiarto & Indarti, 2019).

Ketika BPK menemukan adanya temuan audit yang menggambarkan ketidaksesuaian dengan peraturan atau pedoman, maka mengindikasikan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang buruk. Dengan kata lain, baik buruknya kinerja suatu organisasi pemerintahan daerah dapat dilihat dari jumlah temuan audit yang dilaporkan BPK (Masdiantini & Erawati, 2016). Semakin sedikit jumlah temuan audit maka penyusunan laporan keuangan semakin patuh pada syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang. Sehingga, semakin sedikit jumlah temuan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang disajikan.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setyaningrum dan Syafitri (2012)	Umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, ukuran legislatif, <i>intergovernmental revenue</i> , Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, dan umur administratif pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan, <i>intergovernmental revenue</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Muzahid (2014)	tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman pegawai	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan secara parsial tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas

			laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3.	Khasanah dan Rahardjo (2014)	kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, total aset, umur pemerintah daerah, jumlah skpd, ukuran legislatif, dan temuan audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, jumlah satuan tenaga kerja daerah, tingkat ketergantungan daerah, ukuran legislatif dan temuan audit, umur pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. total aset berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Hendriyani dan Tahar (2015)	Pendapatan asli daerah, belanja modal, temuan audit, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan, jumlah penduduk terbukti memiliki pengaruh namun pengaruh yang negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, belanja modal dan temuan audit terbukti berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Waliyyani dan Mahmud (2015)	umur pemerintahan, size, temuan audit, leverage, dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah

		<i>intergovernmental revenue</i>	berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel size, temuan audit, leverage, dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
6.	Amaliah dan Haryanto (2019)	Tingkat ketergantungan daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, dan temuan audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan populasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Ridwan dan Yahya (2020)	Tingkat ketergantungan daerah, temuan audit bpk, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan ukuran legislatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>intergovernmental revenue</i> , temuan audit, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. <i>Intergovernmental revenue</i> dengan pengaruh positif sedangkan temuan audit dengan pengaruh negatif.

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya akan diawasi DPRD dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya supaya pemerintah daerah dapat mendistribusikan anggaran sebagaimana mestinya. Sehingga, banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Maulana & Handayani, 2015).

Dalam teori institusional, jumlah anggota DPRD merupakan *coersive isomorphism* yaitu tekanan dari organisasi lain dengan “paksaan” oleh organisasi lain yang memiliki kekuasaan lebih besar. Sehingga, semakin banyak anggota DPRD maka fungsi pengawasan dapat dijalankan lebih baik. Adanya pengawasan dari DPRD akan mendorong pemerintah daerah melaksanakan tugas yang telah diberikan yaitu mengungkapkan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa jumlah anggota DPRD berpengaruh positif signifikan mendorong pemda dalam peningkatan tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini disebabkan karena DPRD memiliki fungsi pengawasan dimana DPRD sebagai control berjalannya pemerintahan dan mengawasi jalannya pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Sehingga,

banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan (Kusumawardani, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah

H1: Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Kompleksitas suatu daerah dapat diukur dari seberapa banyak jumlah penduduk di daerah tersebut (Hilmi & Martani, 2012). Sehingga, jumlah penduduk yang besar akan memerlukan berbagai macam sarana publik yang diperlukan guna memenuhi kepuasan publik. Dimana, dalam teori institusional penduduk bertindak sebagai *coercive isomorphism* yaitu tekanan dari pihak lain dengan “paksaan” oleh pihak lain tersebut yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam hal ini, penduduk memiliki harapan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sebagaimana mestinya. Maka, pemerintah daerah merasa diberi tugas atau mandat oleh penduduk untuk mengungkapkan laporan keuangan.

Sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat untuk melakukan pelayanan, diharapkan pemerintah daerah berupaya mengungkapkan segala informasi pada laporan keuangan. Sehingga dengan jumlah penduduk yang besar akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah

daerah didukung penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani (2015) dan Budiarto (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah

H2: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Setiap organisasi pasti menginginkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Begitu pula dengan tujuan dari diadakannya pelatihan, menurut Wungow, Lambey, & Pontoh (2016) mengatakan bahwa efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaian tugas merupakan tujuan dari diberikannya pelatihan kepada para pegawai. Sehingga, ketika pegawai belum menguasai pekerjaannya mungkin karena terdapat peraturan baru mengenai bidang pekerjaannya atau adanya peningkatan daya saing dalam lingkup pekerjaannya dapat diatasi dengan diadakannya pelatihan.

Dalam teori institusional, pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pegawainya termasuk dalam *mimetic isomorphism*. *Mimetic isomorphism* yaitu proses dimana organisasi mengikuti organisasi lain yang sukses pada suatu bidang. Pelatihan juga

dapat dilakukan diluar kota/ daerah dengan tujuan sebagai penyegaran dan menambah wawasan tentang penyusunan laporan keuangan pada daerah lain yang telah maju atau memiliki laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik (Muzahid, 2014). Sehingga ketika suatu organisasi publik di daerah tertentu mengalami kesulitan, misalnya dalam pengungkapan laporan keuangan, maka dapat diadakan pelatihan pada organisasi lain yang memiliki kualitas pengungkapan lebih baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengungkapan pada laporan keuangannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Amalia (2010) dinyatakan bahwa pelatihan memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H3: pelatihan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Peningkatan pengetahuan pada bidang ilmu tertentu dapat diimbangi dengan pengkhususan pendidikan dalam bidang yang berkenaan pula. Pada saat pengambilan keputusan tentu dibutuhkan informasi yang relevan untuk memilah dan menilai sebuah informasi

tentu dibutuhkan kemampuan yang dapat dimiliki melalui pendidikan (Murina & Rahmawaty, 2017).

Pada teori institusional latar belakang pendidikan kepala daerah merupakan *normative isomorphism*. *Normative isomorphism* merupakan norma atau standar yang tepat bagi organisasi berasal dari pendidikan formal pada bidang tertentu yang mendorong tersebarnya kepercayaan normatif itu (Pandansari, 2016). Kepala daerah yang terpilih diharapkan merupakan kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun ekonomi karena dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan peran penting dari kepala daerah (Pratiwi & Aryani, 2016). Dengan demikian, kapabilitas dalam pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan oleh kepala daerah yang mempunyai latar belakang ekonomi atau akuntansi (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Hal ini karena apa saja yang harus disajikan dalam laporan keuangan telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan. Secara logika kepala daerah yang memiliki kapabilitas dalam pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mengikuti pedoman pengungkapan laporan keuangan. Sehingga, akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Muzahid (2014) menemukan bukti bahwa tingkat pendidikan kepala daerah memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah

H4: Latar belakang pendidikan kepada daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Pengaruh Umur Administratif Pemerintahan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Pemerintah daerah yang telah lebih lama ada akan lebih memiliki pengalaman akan lebih berkompetensi dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai pedoman yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (Waliyyani & Makhmud, 2015) karena pemerintah daerah akan berupaya mempelajari kesalahan yang terjadi di masa lampau dengan melihat laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga, upaya perbaikan selalu dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya. Oleh karena itu, semakin bertambahnya umur administratif pemerintah membuahakan profesionalisme dan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam *normative isomorphism*. *Normative isomorphism* sendiri sering diartikan sebagai kelompok profesional yang berperan memperjuangkan suatu praktik tertentu yang timbul pada bidang tersebut.

Pemerintah daerah didorong menunjukkan kesadaran akan tujuan organisasi dengan membuktikan kepada publik bahwa pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki daerah tersebut telah cukup. Dengan demikian akan muncul reaksi dari masyarakat mengenai pengungkapan laporan keuangan yang lebih baik (Khasanah & Rahardjo, 2014). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Waliyyani (2015) dan Setyaningrum (2012) yang menemukan bahwa umur pemerintahan daerah memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Umur administratif pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.6 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam teori institusional, BPK berperan sebagai *normative isomorphism* yaitu kelompok profesional yang memiliki fungsi sebagai pengawas kewajaran sebuah laporan keuangan agar sesuai dengan SAP sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat.

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia menyebabkan pemerintah daerah memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerah otonominya termasuk dalam mengelola keuangan. Kebebasan mengelola daerahnya termasuk pengelolaan keuangan daerah dapat menimbulkan resiko penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Saat BPK menemukan adanya temuan audit yang menggambarkan ketidaksesuaian dengan syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang, maka mengindikasikan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang buruk (Masdiantini & Erawati, 2016). Oleh karena itu, Semakin sedikit jumlah temuan audit maka penyusunan laporan keuangan semakin patuh pada syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang. Sehingga, semakin sedikit jumlah temuan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang disajikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Yahya (2020) menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah

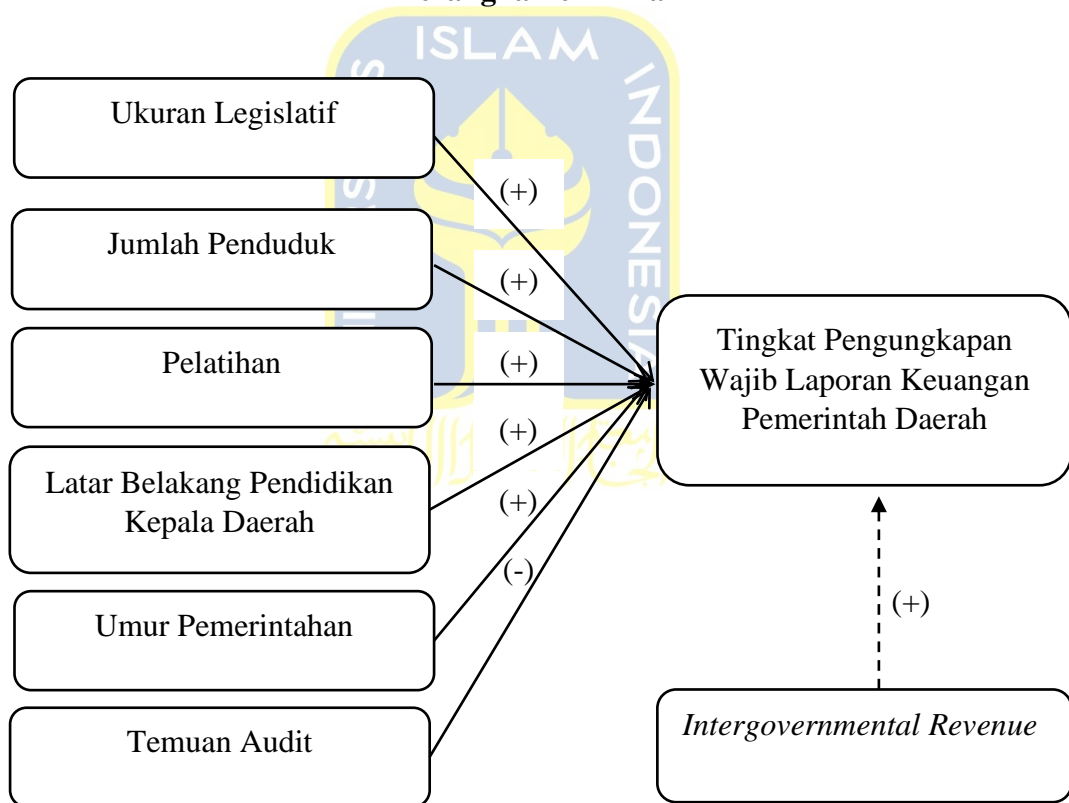
H6: jumlah temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas meliputi latar belakang tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka maka kerangka konseptual penelitian seperti berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah jumlah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi terdiri dari keseluruhan subjek atau objek yang memiliki jumlah serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan populasi berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dengan tahun anggaran 2018. LKPD yang digunakan merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Jumlah pemerintah daerah di Pulau Jawa yaitu sebanyak 119 pemerintah daerah yang terdiri dari 34 pemerintah kota dan 85 pemerintah kabupaten.

Kemudian, sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan dan karakteristik dari populasi. Para peneliti tentu tidak memungkinan untuk mempelajari semua bagian dari populasi. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh peneliti yaitu keterbatasan tenaga, dana seta waktu. Sehingga, dari populasi tersebut peneliti dapat menggunakan sampelnya saja, karena sampel merupakan sebagian dari populasi maka sampel harus representatif atau sampel yang dapat mewakili populasi tersebut. Selanjutnya, apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, akan ditarik simpulan untuk diberlakukan pada populasi (Sugiyono, 2019). Menurut Roscoe (1975) dalam Sugiyono (2019) penentuan ukuran sampel minimal 10 (sepuluh) kali lebih besar dari jumlah variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pernyataan Roscoe tersebut maka jumlah minimal sampel penelitian ini adalah 80 sampel dari

total delapan variabel yang terdiri dari satu variabel dependen, enam variabel independen, dan satu variabel kontrol. Kemudian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 sampel berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa pada tahun anggaran 2018 yang telah diaudit oleh BPK.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan untuk pengambilan sampel. Sehingga sampel yang didapat hanya representatif untuk populasi yang diteliti (Arifin, 2017). Kriteria-kriteria atas sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) kabupaten/kota di Pulau Jawa 2018 yang telah diaudit oleh BPK. Memiliki data yang lengkap untuk pengukuran variabel:
 - a. Menyediakan enam komponen LKPD, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. Menyediakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. *Website* resmi pemerintah yang menyediakan data:
 - a. Menyediakan data jumlah anggota DPRD tahun 2018 pada Daerah Dalam Angka (DDA) masing-masing Pemda atau melalui situs resmi Pemda.

- b. Menyediakan jumlah penduduk yang diukur dengan kepadatan populasi per-km².
- c. Menyediakan data umur administratif pememerintah daerah yang diukur dari undang-undang pembentukannya.
- d. Menyediakan latar belakang Pendidikan kepala daerah tahun 2018.
- e. Menyediakan data pelatihan atau studi banding pegawai pemerintah daerah.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Menurut Sekaran (2011), data sekunder ialah data yang bersumber dari sumber yang sudah ada kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Sumber data sekunder dapat berupa publikasi pemerintah, catatan atau dokumentasi entitas, situs *web*, berita yang dimuat oleh media dan seterusnya. Sedangkan, data primer ialah informasi yang didapatkan oleh peneliti dari tangan pertama yang berhubungan dengan tujuan spesifik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2018 yang telah diperiksa oleh BPK RI, beberapa data variabel independen diambil dari *website* resmi masing-masing daerah, dan data kependudukan dari *website* resmi www.bps.go.id.

3.3 VARIABEL PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019), pengertian variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang bervariasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh mengenai variasi tersebut.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat atau yang juga dikenal dengan *variabel outcome* yaitu variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi karena adanya variabel independen (Benu & Benu, 2019). Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) berdasarkan SAP.

Dalam rerangka konseptual SAP, diperlukan pengungkapan penuh supaya laporan keuangan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi penggunanya, baik pada isi laporan keuangan maupun pada CaLK (Utami & Sulardi, 2019). Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hilmi (2012); Khasanah (2014); serta Hendriyani (2015). Pada penelitian ini, sistem scoring digunakan untuk mengukur variabel dependen. Caranya dengan memberikan skor terhadap daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan SAP berbasis akrual. Skor yang 1 diberikan apabila pada laporan keuangan pemerintah daerah menungkapkan kriteria yang terdapat pada daftar *checklist* dan skor 0 apabila tidak diungkapkan. Jumlah *checklist* sebanyak 243 butir yang dianggap mampu mewakili item-item pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Sehingga, tingkat pengungkapan wajib LKPD dapat dihitung dengan rumus (Setyaningrum & Syafitri, 2012):

Tingkat pengungkapan LKPD

$$= \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah yang menjadi penyebab atau variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan atau munculnya variabel terikat (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif ini merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Tugas DPRD mengawasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran agar dialokasikan dan dikelola dengan baik (Simbolon & Kurniawan, 2018). Sehingga, diasumsikan jumlah anggota DPRD diharapkan mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

$$DPRD = \ln (\text{jumlah anggota DPRD})$$

3.3.2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk digunakan sebagai alat ukur karena dapat menunjukkan kompleksitas suatu daerah. Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi maka semakin besar pula jumlah penduduk daerah tersebut. Semakin kompleks tingkat permasalahan maka menimbulkan tuntutan akan pengungkapan informasi yang semakin tinggi (Hilmi & Martani, 2012).

$$\text{Populasi} = \ln(\text{jumlah penduduk per KM}^2)$$

3.3.2.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Pelatihan ialah proses pendidikan yang memuat praktik-praktik pembelajaran lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan berlangsung dalam jangka pendek. Bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan lain dari pelatihan sebagai tambahan wawasan tentang penyusunan laporan keuangan pada daerah lain yang telah maju atau memiliki laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik, pelatihan ini dapat dilakukan dengan berkunjung ke kota atau daerah tersebut (Muzahid, 2014).

Indikator data yang digunakan dalam pelatihan adalah pelatihan dan kunjungan kerja yang diikuti. Pengukuran variabel pelatihan yaitu skor 1 untuk pemerintah daerah yang

pernah mengikuti pelatihan dan skor 0 untuk pemerintah daerah yang belum pernah mengikuti pelatihan.

3.3.2.4 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan adalah prosedur pembelajaran untuk mendapatkan serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Pembelajaran dilakukan secara terorganisasi dan dalam waktu yang cenderung lama (Murina & Rahmawaty, 2017).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan harapan dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi.

Memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan dengan mudah dilakukan oleh kepala daerah dengan latar belakang Pendidikan akuntansi atau ekonomi, sehingga laporan keuangan yang disajikan memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan tersebut (Suparno & Nanda, 2016).

Indikator yang akan digunakan dalam latar belakang pendidikan kepala daerah adalah pendidikan formal, dimana jika latar belakang pendidikan kepala daerah adalah ekonomi maka bernilai 1. Jika bukan berlatar belakang ekonomi diberi nilai 0 (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Tabel 3.1

Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Latar Belakang Pendidikan kepala daerah	Skor
Ekonomi	1
Bukan Ekonomi	0

3.3.2.5 Umur Administratif Pemerintahan

Hubungan antara umur pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan wajib LKPD, disebabkan karena pemerintah daerah yang telah lama berdiri akan lebih berpengalaman sehingga selalu berusaha mengoreksi kesalahan yang pernah terjadi dengan melihat hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI ditahun anggaran sebelumnya. Kemudian, pemerintah daerah akan berupaya melakukan perbaikan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Indikator pengukuran umur administratif pemerintah daerah dihitung berdasarkan undang-undang pembentukan daerah dengan mengkurangkan dengan tahun anggaran (Waliyyani & Makhmud, 2015).

AGE = Umur Pemda Berdasarkan UU Pembentukan masing-masing pemda

3.3.2.6 Temuan Audit

Temuan audit ialah kasus atau pelanggaran yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan oleh BPK didalam laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kecocokan dengan standar akuntansi pemerintahan, syarat pengendalian internal ataupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan audit dapat dilihat pada resume laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPK. Saat BPK menemukan banyak temuan audit yang menggambarkan ketidaksesuaian dengan peraturan atau pedoman, maka mengindikasikan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang buruk. (Masdiantini & Erawati, 2016). Semakin sedikit jumlah temuan audit maka penyusunan laporan keuangan semakin patuh pada syarat pengendalian internal ataupun syarat yang masih berlaku didalam undang-undang. Sehingga, semakin sedikit jumlah temuan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang disajikan.

FIND = Jumlah Temuan

3.3.3 Variabel Kontrol

3.3.3.1 Intergovernmental Revenue

Pemberian *intergovernmental revenue* bertujuan untuk pemerataan kemampuan ekonomi dan membiayai kebutuhan

khusus daerah seperti membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan *intergovernmental revenue* yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat (Maulana & Handayani, 2015). Sehingga, pemerintah daerah akan mendapat tekanan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana yang diterima dengan tujuan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat.

$$INGOV = \frac{\text{Total dana perimbangan}}{\text{total pendapatan}}$$

3.4 METODE ANALISIS DATA

3.4.1 Uji Statistik deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu uji yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu data dengan melihat dari nilai mean, standar deviasi, varian, minimum, maksimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2018).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melukan uji regresi berganda. Uji tersebut bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan tidak bias. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji heterokedasisitas, dan uji multikolinearitas.

1. Uji Normalitas Sampel

Pada uji t diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Sehingga, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid pada jumlah sampel kecil. Uji normalitas menggunakan grafik normal plot. Grafik menunjukkan data yang normal ketika persebaran data berupa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinieritas

Model regresi seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Maka untuk melihat apakah variabel independen saling berkorelasi atau tidak, dilakukan uji multikolinieritas. Apabila variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Multikolinieritas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen (Ghozali, 2018).

3. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik bersifat homokedastisitas atau tidak bersifat heterokedastisitas. Oleh karena itu uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Apabila varian dari

pengamatan satu kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2018).

3.4.3 Uji Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple linear regression method*). Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel independen yaitu latar belakang Pendidikan kepala daerah, pelatihan, ukuran legislatif, umur pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan temuan audit terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut (Janie, 2012) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$: Masing-masing variabel independen

X_1 : Ukuran Legislatif

X_2 : Jumlah Penduduk

X_3 : Pelatihan

X_4 : Latar belakang Pendidikan Kepala Daerah

X_5 : Umur Administratif Pemerintah Daerah

X_6 : Temuan Audit

X_7 : *Intergovernmental Revenue*

e : Variabel Residual atau error

3.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) berperan untuk melihat seberapa besar variabel independen dalam menjabarkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Ketika, nilai koefisien determinasi kecil berarti menunjukkan kemampuan yang terbatas dari variabel independen dalam menjabarkan variabel dependen. Begitupula, ketika nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel independen memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi perubahan dalam variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.4.5 Uji T

Pengujian hipotesis dalam riset ini memakai uji t. Pada uji t digunakan sebagai tolok ukur pengaruh seluruh variabel independen secara individu (*parsial*) terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan uji t pada tingkat keyakinan sebesar 95% dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga H_0 diterima serta H_1 ditolak, begitu pula ketika nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak serta H_1 diterima.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini menguji pengaruh dari variabel jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk, latar belakang pendidikan kepada daerah, pelatihan, temuan audit, dan umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dari pemerintah daerah di Pulau Jawa. Data dari masing-masing variabel diambil dari *website* resmi masing-masing daerah serta laporan keuangan kabupaten dan kota di Pulau Jawa pada tahun anggaran 2018 yang diminta dari BPK RI.

Jumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa sebanyak 119. Namun hanya 110 laporan keuangan yang memenuhi kriteria yang telah penulis tentukan, meliputi: laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten/kota di Pulau Jawa 2018 yang telah diaudit oleh BPK yang menyediakan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK; *website* resmi pemerintah daerah yang menyediakan data jumlah anggota DPRD tahun 2018, jumlah penduduk yang diukur dengan kepadatan populasi per-km², data umur administratif pemerintah daerah yang diukur dari undang-undang pembentukannya, latar belakang pendidikan kepala daerah tahun 2018, data pelatihan atau studi banding pegawai pemerintah daerah. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan metode analisis regresi berganda. Kemudian, hasil dari pengujian ini digunakan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya.

4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah jumlah DPRD, jumlah penduduk, latar belakang pendidikan kepala daerah, pelatihan, temuan audit, dan umur administratif pemerintah sebagai variabel bebas, tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan wajib pemerintah daerah sebagai variabel terikat, dan *intergovernmental revenue* sebagai variabel kontrol. Kedelapan variabel tersebut telah diuji dengan hasil seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Table 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah DPRD	110	25	55	45,05	7,219
Jumlah Penduduk	110	278	14932	2639,56	3405,123
Pelatihan	110	0	1	,72	,452
Latar Belakang Pendidikan Kepala daerah	110	0	1	,37	,486
Umur Administratif Pemda	110	6	68	61,87	16,016
Temuan Audit	110	1	8	3,02	1,408
<i>Intergovernmental revenue</i>	110	,26	,79	,5975	,09789
Tingkat Pengungkapan Wajib	110	,59	,84	,7039	,04555

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Hasil olah data menggunakan analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada penelitian ini merupakan variabel dependen. Tingkat pengungkapan wajib diukur dengan cara membandingkan seberapa banyak kesesuaian informasi yang diungkapkan oleh pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah didapat dengan permohonan informasi ke *website* resmi e-ppid.bpk.go.id. Kemudian, penulis menerapkan *scoring* pada tiap LKPD. Hasil *scoring* tersebut diuji dengan statistik deskriptif yang menunjukkan hasil seperti pada tabel 4.1 yaitu, skor tertinggi sebesar 0,84 dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kuningan, skor terendah dimiliki oleh Kota Serang sebesar 0.59, serta memiliki skor rerata sebesar 0,7039.
2. Variabel independen yang pertama adalah jumlah DPRD. Jumlah DPRD diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah anggota DPRD tiap kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa pada tahun anggaran 2018. Pada uji ini rerata jumlah DPRD sebesar 45,05. Lalu, jumlah anggota DPRD terendah dimiliki oleh Kota Banjar, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Batu dengan jumlah 25 anggota. Kemudian,

jumlah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten purbalingga dengan jumlah 55 anggota.

3. Jumlah penduduk sebagai variabel dependen diukur dengan kepadatan penduduk setiap KM^2 . Data tersebut diambil dari *website* resmi BPS dari masing-masing provinsi. Kemudian, dari pengujian ini menunjukkan rerata jumlah penduduk per KM^2 di Pulau Jawa pada tahun 2018 sebesar 2639,56. Jumlah penduduk tertinggi sebesar 14932 dimiliki oleh Kota Bandung dan jumlah penduduk terendah dimiliki oleh kabupaten Banyuwangi sebesar 278 penduduk per KM^2 .
4. Pelatihan dalam penelitian ini merupakan pelatihan didaerahnya maupun diluar daerah mengenai pengelolaan keuangan yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang melakukan pelatihan akan diberi skor 1 dan pemerintah daerah yang tidak melakukan pelatihan diberi skor 0. Sehingga, hasil dari uji statistik deskriptif skor tertinggi adalah 1 dan terendah adalah 0. Terdapat 79 kabupaten dan kota melakukan pelatihan dan sisanya tidak melakukan pelatihan. Kemudian, reratanya adalah 0,72 dan standar deviasinya 0,452.
5. Latar belakang Pendidikan kepala daerah diukur dengan cara melihat Pendidikan dari kepala daerah tiap kabupaten dan kota apakah berlatar Pendidikan ekonomi atau bukan ekonomi. Informasi tersebut dapat dilihat dari masing-masing *website* kabupaten dan kota atau informasi yang dituangkan pada bab

informasi non keuangan didalam laporan keuangan pemerintah daerah. kepala daerah dengan latar pendidikan ekonomi akan diberi skor 1 dan non ekonomi akan diberi skor 0. Sehingga, hasil dari uji statistik deskriptif ini memiliki skor maksimum adalah 1, skor minimum 0. Terdapat 41 Kabupaten dan kota dengan kepala daerah berlatar belakang ekonomi dan terdapat 69 kabupaten dan kota dengan kepala daerah berlatar belakang non ekonomi. Serta memiliki rerata 0,37 dan standar deviasi 0,486.

6. Umur administratif pemerintah daerah didapatkan dari selisih tahun pembentukan daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut dengan tahun anggaran. Hasil dari uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah di Pulau Jawa pada tahun anggaran 2018 yaitu 68 tahun merupakan usia tertua dan 6 tahun merupakan yang termuda serta memiliki usia rerata 61,87 tahun dengan standar deviasi 16,016. Adapun kota dengan usia tertua dimiliki oleh 94 kabupaten dan kota. Kemudian, kota termuda di Pulau Jawa dimiliki oleh satu kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran.
7. Temuan audit diukur dengan seberapa banyak jumlah kasus atau pelanggaran yang diungkapkan dalam resume hasil pemeriksaan yang dibuat oleh BPK RI. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa temuan audit terendah sebesar 1 dan tertinggi 8. Rerata pada temuan audit sebesar 3,02 dan standar deviasi 1,408.

Temuan audit terendah dimiliki oleh Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Lebak. Kemudian, temuan tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang.

8. *Intergovernmental revenue* yang tinggi pada suatu daerah dinilai memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pula terhadap pemerintah pusat. Pengukuran indikator *intergovernmental revenue* diukur dengan membagi *intergovernmental revenue* terhadap total pendapatan yang diterima oleh daerah. Hasil dari uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tertinggi senilai 0,79 dan terendah senilai 0,29. Serta memiliki rerata 0,5975 dan standar deviasi sebesar 0,09789. Tingkat ketergantungan tertinggi sebesar 0,79 dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro sedangkan tingkat ketergantungan terendah dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 0,29.

4.2 UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji regresi berganda. Uji tersebut bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan tidak bias. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

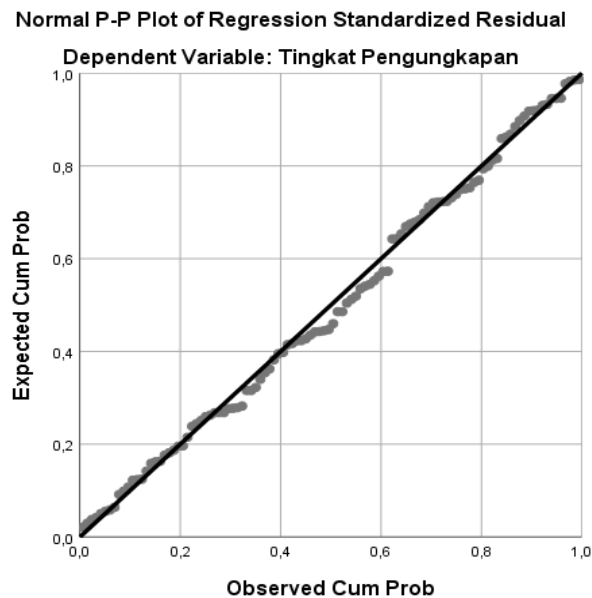
4.2.1 Uji Normalitas

Pada uji t diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Sehingga, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid pada jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS 25 sebagai berikut:

Gambar 4.1

Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik Normal P-P Plot dapat dilihat bahwa persebaran data mengikuti garis diagonal. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, pada pengujian normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen (Ghozali, 2018). Uji ini

bertujuan untuk melihat apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel independennya atau tidak. Hasil uji multikolinieritas menggunakan aplikasi SPSS 25 sebagai berikut:

Table 4.2
Uji Multikolinieritas

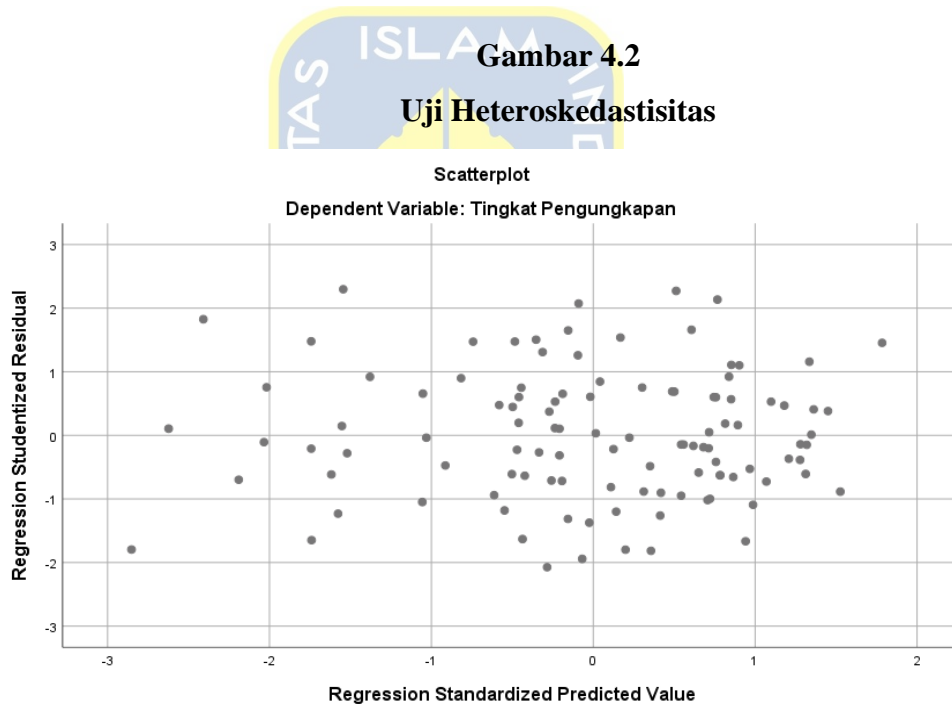
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah DPRD	,455	2,198
	Jumlah Penduduk	,379	2,638
	Pelatihan	,970	1,031
	Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	,871	1,148
	Umur Administratif Pemda	,730	1,370
	Temuan Audit	,847	1,180
	<i>Intergovernmental Revenue</i>	,384	2,603

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Hasil dari uji multikolinieritas pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel independen, dependen maupun variabel control memiliki VIF lebih kecil dari 10. Angka yang dihasilkan dari pengujian seperti berikut: jumlah DPRD sebesar 2,198; jumlah penduduk sebesar 2,638; pelatihan sebesar 1,031; latar belakang pendidikan kepala daerah sebesar 1,148; umur administrasi pemerintah daerah 1,370; temuan audit sebesar 1,180; serta *intergovernmental revenue* sebesar 2,603. Sehingga, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik bersifat homokedastisitas atau tidak bersifat heterokedastisitas. Oleh karena itu uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari pengamatan satu kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2018). Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi SPSS 25 sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Pada grafik *scatterplot* yang ditunjukkan pada gambar 4.2 memperlihatkan bahwa data yang digambarkan dengan titik-titik pada grafik *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pesebaran data yang tidak

beraturan ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka, asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.3 ANALISIS REGRESI BERGANDA

Analisis regresi berganda (*multiple linear regression method*) dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel independen yaitu latar belakang pendidikan kepala daerah, pelatihan, ukuran legislatif, umur pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan temuan audit terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS 25 sebagai berikut:

Table 4.3
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,669	,190		3,520	,001
Jumlah DPRD	,006	,034	,026	,187	,852
Jumlah Penduduk	-,007	,007	-,146	-,953	,343
Pelatihan	-,007	,010	-,067	-,700	,485
Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	-,017	,010	-,184	-1,824	,071
Umur Administratif Pemda	,023	,011	,239	2,177	,032
Temuan Audit	-,001	,003	-,026	-,259	,796
<i>Intergovernmental Revenue</i>	-,031	,071	-,067	-,441	,660

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Hasil analisis regresi berganda menghasilkan koefisien untuk jumlah DPRD (X_1) sebesar 0,006; jumlah penduduk (X_2) sebesar -0,007; pelatihan (X_3) sebesar -0,007; latar belakang Pendidikan kepala daerah (X_4) sebesar -0,017; umur administratif pemerintahan daerah (X_5) sebesar 0,023; temuan audit (X_6) sebesar -0,001; serta variabel kontrol yaitu *Intergovernmental Revenue* (X_7) sebesar -0,031 dengan konstanta 0,669. Sehingga, dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,669 + 0,006X_1 - 0,007X_2 - 0,007X_3 - 0,017X_4 + 0,023X_5 - 0,001X_6 - 0,031X_7 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, variabel tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai 0,669 menunjukkan bahwa, ketika variabel independen bernilai nol maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah bernilai 0,669.
2. Koefisien regresi jumlah anggota DPRD (X_1) senilai 0,006. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,006.
3. Koefisien regresi jumlah penduduk (X_2) senilai -0,007. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,007.
4. Koefisien regresi pelatihan pengelolaan keuangan (X_4) senilai -0,007. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan

- sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,007.
5. Koefisien regresi latar belakang pendidikan kepala daerah (X_3) senilai -0,017. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,017.
 6. Koefisien regresi umur administratif pemerintah daerah (X_6) senilai 0,023. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,023.
 7. Koefisien regresi temuan audit (X_5) senilai -0,001. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,001.
 8. Koefisien regresi *intergovernmental revenue* (X_7) senilai -0,031. Angka tersebut memiliki makna setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,031.

4.4 KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien Determinasi (R^2) berperan untuk melihat seberapa besar variabel independen dalam menjabarkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Ketika, nilai koefisien determinasi kecil berarti menunjukkan kemampuan yang terbatas dari

variabel independen dalam menjabarkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil dari analisa data mendapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Table 4.4
Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,315 ^a	,099	,038	,04521
a. Predictors: (Constant), <i>Intergovernmental Revenue</i> , Pelatihan, Latar Belakang Pendidikan Kepala daerah, Temuan Audit, Jumlah DPRD, Umur Administratif Pemda, Jumlah Penduduk				
b. Dependen Variabel: Tingkat Pengungkapan Wajib				

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Hasil pengujian koefisien determinasi mendapatkan nilai sebesar 0.038, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh jumlah DPRD, jumlah penduduk, latar belakang pendidikan kepala daerah, pelatihan, temuan audit, umur administratif pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* sebagai variabel independen sebesar 3,8% dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Sedangkan, sisanya 96,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel yang telah penulis gunakan.

4.5 UJI HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dalam riset ini memakai uji t. Pada uji t digunakan sebagai tolok ukur pengaruh seluruh variabel independen secara individu

(parsial) terhadap variabel dependennya. Penjelasan dari hasil uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

$H_0 : \beta_1 = 0$ jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil dari pengujian uji statistik t pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung sebesar 0,187 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,852. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,852 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Maka, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

2. Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

$H_0 : \beta_2 = 0$ jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil dari pengujian uji statistik t pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung sebesar -0,953 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,343. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,343 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.

Maka, jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

3. Pengaruh pelatihan pengelolaan keuangan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

$H_0 : \beta_3 = 0$ pelatihan pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ pelatihan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil dari pengujian uji statistik t pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung sebesar -0,700 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,485. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,485 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Maka, pelatihan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4. Pengaruh latar belakang pendidikan kepala daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

$H_0 : \beta_4 = 0$ latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

$H_1 : \beta_4 \neq 0$ latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil dari pengujian uji statistik t pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung sebesar -1,824 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,071. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,071 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Maka, latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

5. Pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

$H_0 : \beta_5 = 0$ umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

$H_1 : \beta_5 \neq 0$ umur administratif pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil dari pengujian uji statistik t pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,177 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,032. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,032 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima. Maka, umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

6. Pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

$H_0 : \beta_6 = 0$ temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

$H_1 : \beta_6 \neq 0$ temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil dari pengujian uji statistik t pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung sebesar -0,259 dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,796. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,796 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.

Maka, temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4.6 PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji berbagai faktor potensial yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia, diantaranya meliputi: jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk, latar belakang pendidikan kepala daerah, pelatihan, temuan audit, dan umur administratif pemerintah daerah. Berdasar dari hasil pengujian yang telah penulis lakukan dapat dilihat bahwa umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Pembahasan terkait hasil pengujian variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Jumlah Anggota DPRD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil nilai koefisien beta sebesar 0,006 yang berarti setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) sebesar 0,006. Hasil nilai signifikan (sig.) sebesar $0,852 > 0,05$, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD dapat disebabkan oleh penurunan kinerja keuangan (Khasanah & Rahardjo, 2014). Penurunan kinerja

keuangan yang terjadi dapat diakibatkan karena semakin banyak jumlah anggota DPRD semakin rumit dalam berkoordinasi guna mengontrol kepatuhan dalam pengungkapan LKPD. Rumit dalam hal ini karena semakin banyak anggota maka semakin banyak saran dan pendapat yang harus diselaraskan. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik kesalahpahaman ketika saran dan pendapat dari para anggota tidak dapat disatukan. Alasan lainnya, penurunan kinerja keuangan juga dapat terjadi pada para anggota DPRD disebabkan oleh pengetahuan atau latar belakang pendidikan para anggota DPRD yang beragam, dalam hal ini pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan. Seharusnya anggota DPRD memiliki pengetahuan atau kompetensi pada komisi dimana ia ditempatkan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosita et. al (2014) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Ketika, anggota DPRD memiliki pengetahuan yang mumpuni maka kinerja akan membaik sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik dan berdampak pada peningkatan pengungkapan wajib LKPD. Berdasarkan pada uraian diatas pada penelitian ini asumsi *coersive isomorphism* oleh jumlah anggota DPRD tidak terbukti dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengungkapan wajib pada LKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dipaparkan oleh Khasanah dan Rahadjo (2014); dan Simbolon dan Kurniawan (2018)

yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil nilai koefisien beta sebesar -0,007 yang berarti setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) sebesar 0,007. Kemudian, nilai signifikan (sig.) sebesar 0,343 > 0,05. Oleh karena itu, pada penelitian ini jumlah penduduk tidak terbukti dapat mendorong peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

Sementara itu, menurut asumsi teori institusional penduduk merupakan bagian dari *coersive isomorphism* yang merupakan tekanan dari pihak luar karena semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah menjadikan wilayah tersebut semakin kompleks. Sehingga, jumlah penduduk yang besar akan memerlukan berbagai macam sarana publik yang diperlukan guna memenuhi kepuasan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi terkait keuangan daerah. Informasi tersebut oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Pada penelitian ini *coersive isomorphism* tidak terbukti dapat mendorong tingkat pengungkapan. Hal ini dapat diakibatkan oleh kondisi geografis. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Arifin, Tower, dan Porter (2013) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang berada di Pulau Jawa mengungkapkan lebih banyak dibanding pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau paling padat di Indonesia dengan tingkat kepadatan yang hampir sama tiap daerahnya. Pulau Jawa juga memiliki fasilitas pendidikan yang merata yang hampir sama pada setiap daerah. Menurut data yang dirilis pada *website* BPS, fasilitas pendidikan di Pulau Jawa lebih tinggi dari pulau lain yaitu sebesar 38%. Setiap penduduk mendapatkan pendidikan yang merata sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang hampir sama pula. Berbeda dengan daerah lain di luar Pulau Jawa yang memiliki perbedaan mencolok pada fasilitas dan infrastruktur tiap daerahnya. Oleh karena itu, jumlah penduduk sedikit atau banyak pada pemerintah daerah di Pulau Jawa tidak begitu mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sedangkan, di daerah lain hasilnya mungkin dapat berbeda karena jumlah penduduk yang lebih banyak mempunyai tekanan *coersive* yang lebih kuat dari pada daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit karena kualitas SDM antar daerah berbeda-beda sehingga faktor jumlah penduduk menjadi peran penting dalam mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Amaliyah dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa jumlah

penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

4.6.3 Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil nilai koefisien beta sebesar -0,007 yang berarti setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) sebesar 0,007. Kemudian, nilai signifikan (sig.) sebesar 0,485 > 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan tidak terbukti dapat mendorong peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

Sementara itu, menurut teori institusional pelatihan pengelolaan keuangan merupakan *mimetic isomorphism* dimana pemerintah daerah mengikuti suatu pendidikan singkat dari organisasi yang dianggap lebih berkompeten atau bisa juga pemerintah daerah lain yang sukses dalam hal peningkatan pengungkapan LKPD. Pelatihan yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD bisa terjadi akibat peserta pelatihan tidak mengimplementasikan materi dari pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan. Sehingga, walaupun pelatihan telah dilakukan tidak akan berdampak bagi tingkat pengungkapan wajib. Berdasarkan pada uraian diatas pada penelitian ini asumsi *mimetic isomorphism* oleh pelatihan pengelolaan keuangan tidak terbukti dapat mempengaruhi

pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengungkapan wajib pada LKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Budiono, Muchlis, dan Masri (2018) yang menyatakan bahwa pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

4.6.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil nilai koefisien beta sebesar -0,017 yang berarti setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) sebesar 0,017. Kemudian, nilai signifikan (sig.) sebesar 0,071 > 0,05. Oleh karena itu, pada penelitian ini latar belakang pendidikan kepala daerah tidak terbukti dapat mendorong peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

Sementara itu, menurut teori institusional latar belakang pendidikan kepala daerah merupakan tekanan *normative isomorphism* karena kepala daerah yang terpilih berperan sebagai kelompok profesional yang menjalankan suatu praktik dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan. Begitu pula menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah memegang kekuasaan penuh atas

pengelolaan keuangan daerah serta menjadi wakil atas kepemilikan kekayaan daerah tersebut. Sehingga, kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi maupun akuntansi dapat lebih baik mengelola keuangan daerah. Namun, pada penelitian ini latar belakang pendidikan kepala daerah tidak terbukti dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Tabel 4.5
Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Kepala Daerah	Tingkat Pengungkapan
Ekonomi	41	70%
Non Ekonomi	69	71%

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 69 dari 110 kepala daerah memiliki latar belakang pendidikan bukan ekonomi. Kemudian, rerata tingkat pengungkapan wajib dengan kepala daerah dengan latar belakang pendidikan non ekonomi sedikit lebih besar dari daerah yang memiliki kepala daerah dengan latar belakang ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pegawai pemerintah daerah merupakan sarjana bahkan doktor. Sehingga, kepala daerah sangat terbantu dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan karena terdapat para pegawai yang profesional dibidangnya termasuk bidang keuangan. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan tidak terlalu penting bagi kepala daerah

untuk dapat menyelesaikan berbagai tugas operasionalnya khususnya bidang keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Budiarto dan Indarti (2019) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

4.6.5 Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil nilai koefisien beta sebesar 0,023 yang berarti setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) sebesar 0,023. Kemudian, nilai signifikan (sig.) sebesar $0,032 < 0,05$. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa umur administratif pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Daerah yang telah lebih dulu berdiri memiliki potensi lebih tinggi dalam meningkatkan pengungkapan wajibnya, dibandingkan dengan pemerintah daerah yang belum lama berdiri (Waliyyani & Makhmud, 2015). Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah daerah belajar dari laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan anggaran tahun lalu yang telah diperiksa BPK RI, dimana dalam laporan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi. Dalam teori institusional umur administratif pemerintahan daerah termasuk *normative*

isomorphism karena pemerintah daerah yang lebih lama berdiri semakin mahir dan memiliki kompetensi yang lebih baik agar laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan pada uraian diatas pada penelitian ini asumsi *normative isomorphism* oleh umur administratif pemerintahan daerah terbukti dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengungkapan wajib pada LKPD.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4.6.6 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil nilai koefisien beta sebesar -0,001 yang berarti setiap terjadi penambahan sebesar 1 maka akan menurunkan tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y) sebesar 0,001. Kemudian, nilai signifikan (sig.) sebesar 0,769 > 0,05. Oleh karena itu, pada penelitian ini temuan audit tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

Sementara itu, menurut asumsi teori institusional temuan audit merupakan bagian dari *normative isomorphism*. Unsur tekanan pada *normative isomorphism* dikembangkan oleh kelompok profesional dan pekerjaan (Arifin, Tower, & Porter, 2013). Dalam hal ini, temuan

audit berasal dari hasil dari pemeriksaan BPK yang mana merupakan kelompok profesional yang memiliki fungsi sebagai pengawas kewajaran sebuah laporan keuangan agar sesuai dengan SAP.

Pada penelitian ini hasil olah data pada uji t menunjukkan hasil negatif, artinya semakin sedikit temuan audit pada laporan hasil pemeriksaan, maka laporan keuangan akan semakin baik dan menggambarkan semakin baik kinerja pemerintah daerah, akan tetapi temuan audit tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dapat terjadi karena temuan audit pada laporan keuangan dapat berisi mengenai kecurangan atau kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang tidak serta merta menjurus pada kerugian material (Masdiantini & Erawati, 2016). Berdasarkan pada uraian di atas, pada penelitian ini tekanan *normative isomorphism* yang diproksikan dengan variabel temuan audit tidak terbukti dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengungkapan wajib pada LKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Pengungkapan (*disclosure*) diartikan sebagai pemaparan informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan. Dalam pengungkapan laporan keuangan informasi dan penjelasan yang diberikan hendaknya mencukupi agar dapat bermanfaat seluas-luasnya. Agar informasi memberikan gambaran yang jelas dan tidak membingungkan maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terdapat dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan yang disusun oleh pemerintah daerah maupun pusat yaitu pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib memiliki makna informasi keuangan yang untkapkan harus berdasarkan pertaturan yang berlaku yaitu bedasar pada SAP. Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dapat terjadi akibat penurunan kinerja dan tidak terlaksananya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tidak terlaksana karena anggota DPRD tidak memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan. Ketika anggota DPRD memiliki kompetensi dan wawasan mengenai pengeloaan keuangan maka kinerja akan membaik sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik dan berdampak pada peningkatan pengungkapan wajib LKPD.

2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dapat diakibatkan oleh kondisi geografis. Pulau Jawa merupakan pulau paling padat di Indonesia dan memiliki fasilitas pendidikan yang merata yang hampir sama tiap daerah. Oleh karena itu, setiap penduduk mendapatkan pendidikan yang sama sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang hampir sama pula. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki perbedaan fasilitas yang mencolok. Oleh sebab itu, jumlah penduduk di Pulau Jawa sedikit atau banyak tidak begitu mempengaruhi tingkat pengungkapan karena *coersive isomorphism* antardaerah yang hampir sama.
3. Pelatihan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dapat terjadi apabila peserta pelatihan tidak mengimplementasikan materi dari pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan. Sehingga, walaupun pelatihan telah dilakukan tidak akan berdampak bagi tingkat pengungkapan wajib.
4. Latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Pada perbandingan tingkat pengungkapan wajib dengan kepala daerah dengan latar belakang pendidikan non ekonomi hampir sama persentasenya. Hal ini dapat terjadi karena kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para pegawai pemerintah daerah yang profesional dalam bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Sehingga, latar belakang pendidikan tidak terlalu penting bagi kepala daerah untuk dapat

menyelesaikan berbagai tugas operasionalnya khususnya bidang keuangan.

5. Umur administratif pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, artinya semakin lama daerah tersebut berdiri maka semakin tinggi tingkat pengungkapan wajibnya dibandingkan dengan pemerintah daerah yang belum lama berdiri. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah daerah yang lebih lama berdiri semakin mahir dan memiliki kompetensi yang lebih baik agar laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kompetensi dan kemahiran ini didapat dari temuan dan rekomendasi dari BPK RI yang dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan pembelajaran untuk tahun anggaran selanjutnya.
6. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil olah data pada uji t menunjukkan hasil negatif artinya semakin sedikit temuan audit maka laporan keuangan akan semakin baik tetapi tidak dapat mempengaruhi secara signifikan. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua temuan audit bersifat material atau berupa kerugian keuangan. Temuan audit dapat berupa kecurangan atau kasus kelemahan sistem pengendalian internal.

5.2 SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka berikut adalah saran yang penulis berikan:

1. Saran teoritis

- a) Pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar menggunakan variabel potensial independen yang lain. Contohnya, indeks pembangunan manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), total aset, pendapatan asli daerah, dan faktor-faktor potensial lainnya.
- b) Pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar memperluas populasi agar mendapat sampel lebih banyak, misalnya pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

2. Saran Praktis

- a) Saran peneliti kepada pemerintah daerah untuk lebih memahami isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga semua data yang wajib dapat diungkapkan.
- b) Pemerintah daerah yang lebih muda diharapkan lebih banyak belajar dari pemerintah daerah yang telah lama berdiri karena lebih berpengalaman. Pemerintah daerah yang lebih muda dapat melakukan kegiatan seperti studi banding, pelatihan, maupun bimbingan teknis agar dapat mengasah kemampuan dan menambah ilmu baru dari pemerintah daerah yang telah lama berdiri.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Anwar, D. S., & Amalia, D. (2010). Pengaruh Tindakan Supervisi, Budaya Organisasi, Kepribadian, Dan Pelatihan Terhadap Kelengkapan Laporan Keuangan Studi pada Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 7(1), 17-32.
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2013). Fiscal Policy Disclosure In Indonesian Local Governments. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 17(1), 13-30.
- Benu, F. L., & Benu, A. S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Pertanian, dan Lainnya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? Riset pada kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Budiono, V. S., Muchlis, M., & Masri, I. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 110-128.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 147-160.
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 15-29.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2019). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Journal of Accounting and Investment (JAI)*, 1-20.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).
- Hidayanti, E., & Sunyoto, S. (2012). Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi: Kajian Literatur dan Riview Beberapa Artikel Penelitian Terkait Pengungkapan. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 2(2), 19-28.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20.

- Janie, D. N. (2012). *Deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press.
- Kasmir, B., & Lainnya, L. K. (2013). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2), 1-11.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. *Accounting analysis journal*, 1(1), 27-35.
- Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3).
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Murina, S., & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 111-120.
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 2(2), 179-196.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3), 463-484.
- Pramesti, K. S., Prayudi, M. A., & Wahyuni, M. A. (2018). Teori Institusional dan Kualitas Penyusunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada

- Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167-189.
- Ridwan, M., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 429-437.
- Rosita, N. M., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Dprd Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Rekstrurisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: MandarMaju.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 154-170.
- Simbolon, H. A., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *MODUS Journals*, 30(1), 54-70.
- Standar Akuntansi Keuangan*. (2015). Jakarta: IAI.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 30-42.
- Suparno, S., & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 105-118.

- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 253-263.
- Waliyyani, G. M., & Makhmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik Pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2).
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan jabatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 7(2).



Lampiran 1

Tabel *Checklist* Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Nama Kab/Kota :

Tahun :

Keterangan :

1 : YA

0 : TIDAK

CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		1	0
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
A	Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, serta pencapaian target sesuai Peraturan Daerah APBD.		
1	Kebijakan fiskal/keuangan mengungkapkan:		
a.	Perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya/dengan anggaran/dengan rencana lainnya.		
b.	Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.		
2	Ekonomi makro, menjelaskan pengungkapan:		
a.	Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya.		
b.	Perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.		
B	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan		

	1	Menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR.		
	2	Menjelaskan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu		
	3	Perbandingan target sebagaimana tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya		
C	Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.			
	Kebijakan Akuntansi			
	1	Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan.		
	2	Isi kebijakan akuntansi meliputi penjelasan:		
	a.	Entitas pelaporan		
		i	Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.	
		ii	Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya	
		iii	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.	
		iv	Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada di bawahnya.	
	b.	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan		
			Pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari Laporan Keuangan Pemerintah yang semestinya diungkapkan	
	c.	Basis penyusunan laporan keuangan adalah basis, sehingga:		
		i	Basis yang digunakan dalam neraca adalah	

			basis akrual		
		ii	Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.		
		d.	Basis pengakuan dan pengukuran:		
			Aset		
			Pengakuan aset: aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenugasannya berpindah.		
			Pengukuran aset, sebagai berikut:		
		i	Kas dicatat sebesar nilai nominal.		
		ii	Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.		
		iii	Piutang dicatat sebesar nilai nominal.		
		iv	Persediaan dicatat sebesar: (1) Biaya perolehan apabila dengan pembelian, (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.		
		v	Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya, kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunakan metode ekuitas; >50% menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan non permanen menggunakan nilai bersih yang direalisasikan.		

		vi	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika tidak dimungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.			
		vii	Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.			
		Kewajiban				
		Pengakuan kewajiban: kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal/diaku pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.				
		Pengukuran kewajiban: kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.				
		Kewajiban dalam mata uang asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.				
		i	Kewajiban Jangka Pendek, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.			
		ii	Kewajiban Jangka Panjang, suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.			
		Ekuitas				

		Ekuitas secara keseluruhan dicatat sebesar selisih antara aset dan kewajiban.		
		Pendapatan		
		Pengakuan pendapatan-LO: diakui saat (a) timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.		
		Pengakuan pendapatan-LRA: pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.		
		Pengukuran pendapatan: berdasarkan asa bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.		
		Belanja		
		Pengakuan belanja: belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.		
		Beban		
		Beban diakui pada saat: a. timbulnya kewajiban; b. terjadinya konsumsi aset; c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa		
		Penerimaan Pembiayaan		
		Pengakuan penerimaan pembiayaan saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.		
		Pengukuran penerimaan pembayaran dilaksanakan berdasarkan asa bruto.		
		Pengeluaran Pembiayaan		
		Pengukuran pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.		

		Metode penyajian laporan arus kas		
		Metode penyajian yang digunakan untuk menyajikan laporan arus kas dan alasannya.		
		Penjelasan setiap pos pada laporan keuangan		
		LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
		PENDAPATAN		
		Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, meliputi:		
		i	Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari:	
			(a) Pendapatan pajak daerah	
			(b) Pendapatan retribusi daerah	
			(c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
			(d) Lain-lain PAD yang sah	
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran PAD.	
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu.	
		ii	Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari:	
			(a) Dana Perimbangan	
			Dana Bagi Hasil Pajak	
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
			Dana Alokasi Umum	
			Dana Alokasi Khusus	
			(b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	

			Lainnya		
			Dana Otonomi Khusus		
			Dana penyesuaian		
			(c) Transfer Pemerintah Provinsi		
			Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
			Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer periode ini dan transfer periode yang lalu.		
		iii	Rincian dan penjelasan lain-lain pendapatan yang sah , yang terdiri dari:		
			(a) Pendapatan Hibah		
			(b) Pendapatan Dana Darurat		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran lain-lain pendapatan yang sah.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara lain-lain pendapatan yang sah periode ini dan lain-lain pendapatan yang sah periode lalu.		
			BELANJA		
		i	Rincian dan penjelasan belanja operasi, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Pegawai		

			(b) Belanja Barang		
			(c) Bunga		
			(d) Subsidi		
			(e) Hibah		
			(f) Bantuan Sosial		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
		ii	Rincian dan penjelasan belanja modal, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Tanah		
			(b) Belanja Peralatan dan Mesin		
			(c) Belanja Gedung dan Bangunan		
			(d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
			(e) Belanja Aset Tetap Lainnya		
			(f) Belanja Aset Lainnya		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
		iii	Belanja Tak Terduga		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		

			TRANSFER		
		i	Rincian transfer/bagi hasil pendapatan ke desa, terdiri dari:		
			(a) Bagi hasil pajak ke desa		
			(b) Retribusi		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara transfer periode ini dan periode yang lalu.		
			PEMBIAYAAN		
		i	Rincian penerimaan pembiayaan, mencakup:		
			(a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa)		
			(b) pencairan dana cadangan		
			(c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
			(d) pinjaman dalam negeri - pemerintah pusat		
			(e) pinjaman dalam negeri - pemerintah daerah lainnya		
			(f) pinjaman dalam negeri - lembaga keuangan bank		
			(g) pinjaman dalam negeri - lembaga keuangan bkn bank		
			(h) pinjaman dalam negeri - obligasi		

			(i) pinjaman dalam negeri - lainnya		
			(j) penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara		
			(k) penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah		
			(l) penerimaan kembali kepada pemda lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran penerimaan pembiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara penerimaan pembiayaan periode ini dan penerimaan pembiayaan periode yang lalu.		
		ii	Rincian pengeluaran pembiayaan		
			(a) Pembentukan dana cadangan		
			(b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
			(c) pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat		
			(d) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah daerah lainnya		
			(e) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - lembaga keuangan bank		
			(f) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - lembaga keuangan bukan bank		
			(g) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - obligasi		
			(h) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - lainnya		
			(i) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		

			(j) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
			(k) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran pengeluaran pembiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pengeluaran pembiayaan periode ini dan pengeluaran pembiayaan periode yang lalu.		
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH					
			Rincian sakdo anggaran lebih, terdiri dari :		
		i	Saldo anggaran lebih awal		
		ii	Penggunaan SAL		
		iii	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan		
		iv	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		
		v	Lain-lain		
		vi	Saldo anggaran lebih akhir		
NERACA					
ASET					
Kas dan setara kas					
Menjelaskan rincian kas yang terdiri dari:					
		i	Kas di Kas Daerah		
		ii	Kas di Bendahara Pengeluaran		
		iii	Kas di Bendahara Penerimaan		
Investasi Jangka Pendek					

		Menjelaskan rincian investasi jangka pendek.		
		Perubahan harga pasar.		
		Piutang Pajak dan Bukan Pajak		
		Menjelaskan rincian piutang yang mencakup:		
	i	Piutang pajak		
	ii	Piutang Retribusi		
	iii	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
	iv	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
	v	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
	vi	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
	vii	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	viii	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	ix	Piutang Lainnya		
		Persediaan		
		Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian persediaan seperti: perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat; barang/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.		
		Kondisi persediaan tersebut.		
		Investasi Jangka Panjang		
		Menjelaskan rincian investasi jangka panjang berdasarkan jenisnya, meliputi:		
	i	Investasi Nonpermanen, mencakup:		

			(a) Pinjaman Jangka Panjang		
			(b) Investasi dalam Surat Utang Negara		
			(c) Investasi dalam Proyek Pembangunan		
			(d) Investasi Nonpermanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
		ii	Investasi permanen, mencakup:		
			(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
			(b) Investasi Permanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
			Aset Tetap		
			Menjelaskan klarifikasi aset tetap dan rincian lebih lanjut, meliputi:		
		i	Rincian Tanah		
			Penambahan/Pelepasan Tanah		
		ii	Rincian Peralatan dan Mesin		
			Penambahan/Pelepasan Peralatan dan Mesin		
		iii	Rincian Gedung dan Bangunan		
			Penambahan/Pelepasan Gedung dan Bangunan		
		iv	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
			Penambahan/Pelepasan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
		v	Rincian Aset Tetap Lainnya		
			Penambahan/Pelepasan Aset Tetap Lainnya		
		vi	Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan		
			Informasi penyusutan, meliputi:		

		i	Nilai penyusutan			
		ii	Metode penyusutan yang digunakan			
		iii	Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan			
		iv	Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode			
		Tambahan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:				
		i	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap			
		ii	Tanggal efektif penilaian kembali			
		iii	Jika ada, nama penilai independen			
		iv	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti			
		v	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap			
		Tambahan untuk konstruksi dalam pengerjaan, meliputi:				
		i	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya			
		ii	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya			
		iii	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan			
		iv	Uang muka kerja yang diberikan			
		v	Retensi			
		Dana Cadangan				
		Penjelasan dana cadangan, meliputi:				
		i	Perda pembentukannya			

		ii	Tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan, dan rencana penggunaannya			
		Aset Lainnya				
		Menjelaskan rincian aset lainnya yang mencakup:				
		i	Tagihan Penjualan Angsuran			
		ii	Tuntutan Perbendaharaan			
		iii	Tuntutan Ganti Rugi			
		iv	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
		v	Aset Tak Berwujud			
		vi	Aset Lain-lain			
		KEWAJIBAN				
		Utang Jangka Pendek				
		Rincian utang jangka pendek berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:				
		i	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
		ii	Utang Bunga			
		iii	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
		iv	Pendapatan Dibayar Dimuka			
		v	Utang Belanja			
		vi	Utang Jangka Pendek Lainnya			
		Utang Jangka Panjang				
		Rincian utang jangka panjang pemberi pinjaman, mencakup:				
		i	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			
		ii	Utang dalam Negeri-Obligasi			

		iii	Premium (Diskonto) Obligasi		
		iv	Utang Jangka Panjang Lainnya		
			Jumlah tunggakan disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.		
			Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.		
			Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.		
			Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang digunakan.		
			Utang Jangka Panjang yang direstrukturisasi harus mengungkapkan:		
		i	Pengurangan pinjaman		
		ii	Modifikasi persyaratan utang		
		iii	Pengurangan tingkat bunga pinjaman		
		iv	Pengunduran jatuh tempo pinjaman		
		v	Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman		
		vi	Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan		
			EKUITAS		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran ekuitas.		

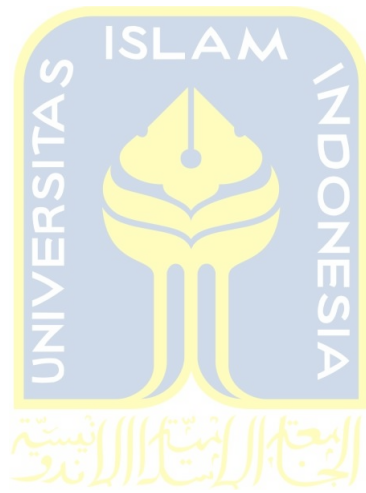
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara ekuitas periode ini dan ekuitas periode yang lalu.		
LAPORAN OPERASIONAL					
			Kegiatan Operasional pendapatan		
			Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, meliputi:		
		i	Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari:		
			Pendapatan Pajak Daerah		
			Pendapatan Retribusi Daerah		
			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
			Pendapatan Asli Daerah Lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu.		
		ii	Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari:		
			(a) Dana Perimbangan		
			Dana Bagi Hasil Pajak		
			Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
			Dana Alokasi Umum		
			Dana Alokasi Khusus		
			(b) Pendapatan Transfer Lainnya		
			Dana Otonomi Khusus		
			Dana penyesuaian		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer periode ini dan transfer periode		

			yang lalu.		
			(c) Transfer Pemerintah Provinsi		
			Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
			Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer periode ini dan transfer periode yang lalu		
		iii	(a) Pendapatan Hibah		
			(b) Pendapatan Dana Darurat		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara lain-lain pendapatan yang sah periode ini dan lain-lain pendapatan yang sah periode lalu.		
			Beban		
			Rincian beban, yang terdiri dari:		
		i	Beban Pegawai		
		ii	Beban Persediaan		
		iii	Beban Jasa		
		iv	Beban Pemeliharaan		
		v	Beban Perjalanan Dinas		
		vi	Beban Bunga		
		vii	Beban Subsidi		
		viii	Beban Hibah		
		ix	Beban Bantuan Sosial		
		x	Beban Penyusutan		
		xi	Beban Transfer		

		xii	Beban Lain-lain			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara beban periode ini dan beban periode lalu.			
		Kegiatan Non Operasional				
		Rincian kegiatan non operasional, yang terdiri dari:				
			Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
			Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
			Defisit Penjualan Aset Nonlancar			
			Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
			Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer periode ini dan surplus/defisit periode yang lalu.			
		Pos Luar Biasa				
		Rincian kegiatan pos luar biasa, yang terdiri dari:				
		i	Pendapatan Luar Biasa			
		ii	Beban Luar Biasa			
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara tranfer periode ini dan pos luar biasa periode yang lalu.			
		LAPORAN ARUS KAS				
		i	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar dari aktivitas operasi			
		ii	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari investasi			

		iii	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan		
		iv	Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris		
SALDO PERUBAHAN EKUITAS					
		i	Ekuitas awal		
		ii	Surplus/deficit LO pada periode awal		
		iii	Koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang anatar lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar		
		iv	Ekuitas akhir		
		f.	Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan Keuangan		
D	Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan				
	1	Penjelasan mengenai kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.			
E	Pengungkapan lainnya				
	1	Mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan/pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang mempunyai dampak social.			
Total Item					

Sumber: (Octasia, 2018), (Undang-undang Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)



Lampiran 2

Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengungkapan		
		jmlh (1)	Total (2)	(1)/(2)
1	Kab Sukabumi	177	243	0,73
2	kab Bogor	170	243	0,70
3	kab Bandung	161	243	0,66
4	Kab Garut	175	243	0,72
5	Kab Tasikmalaya	158	243	0,65
6	Kab Ciamis	163	243	0,67
7	kab Kuningan	203	243	0,84
8	Kab Cirebon	162	243	0,67
9	Kab Majalengka	184	243	0,76
10	Kab Sumedang	170	243	0,70
11	Kab Indramayu	168	243	0,69
12	Kab Subang	164	243	0,67
13	Kab Purwakarta	153	243	0,63
14	Kab Karawang	182	243	0,75
15	Kab Bekasi	172	243	0,71
16	Kab Bandung Barat	159	243	0,65
17	Kab Pangandaran	164	243	0,67
18	Kota Bogor	159	243	0,65
19	Kota Sukabumi	188	243	0,77
20	Kota Bandung	182	243	0,75
21	Kota Cirebon	155	243	0,64
22	Kota Bekasi	179	243	0,74
23	Kota Depok	162	243	0,67
24	Kota tasikmalaya	161	243	0,66
25	Kota Banjar	166	243	0,68
26	Kab Cilacap	157	243	0,65
27	Kab Banyumas	175	243	0,72
28	Kab Purbalingga	178	243	0,73
29	Kab Banjarnegara	171	243	0,70
30	Kab Kebumen	173	243	0,71
31	Kab Purworejo	151	243	0,62
32	Kab Wonosobo	188	243	0,77
33	Kab Magelang	165	243	0,68
34	Kab Boyolali	181	243	0,74

35	Kab Klaten	179	243	0,74
36	Kab Sukoharjo	170	243	0,70
37	Kab Wonogiri	163	243	0,67
38	Kab Karanganyar	157	243	0,65
39	Kab Sragen	167	243	0,69
40	Kab Grobogan	178	243	0,73
41	Kab Blora	169	243	0,70
42	Kab Rembang	166	243	0,68
43	Kab Pati	175	243	0,72
44	Kab Kudus	163	243	0,67
45	Kab Jepara	166	243	0,68
46	Kab Demak	179	243	0,74
47	Kab Semarang	171	243	0,70
48	Kab Temanggung	185	243	0,76
49	Kab Kendal	179	243	0,74
50	Kab Batang	165	243	0,68
51	Kab Pekalongan	166	243	0,68
52	Kab Pemasang	173	243	0,71
53	Kab Tegal	166	243	0,68
54	Kab Brebes	172	243	0,71
55	Kota Magelang	155	243	0,64
56	Kota Surakarta	164	243	0,67
57	Kota Salatiga	178	243	0,73
58	Kota Semarang	166	243	0,68
59	Kota Pekalongan	190	243	0,78
60	Kota Tegal	161	243	0,66
61	Kab Kulon Progo	171	243	0,70
62	Kab bantul	184	243	0,76
63	Kab Gunung Kidul	182	243	0,75
64	Kab Sleman	203	243	0,84
65	Kota Yogyakarta	170	243	0,70
66	Kab Pacitan	199	243	0,82
67	Kab Ponorogo	165	243	0,68
68	Kab Trenggalek	168	243	0,69
69	Kab Tulungagung	183	243	0,75
70	Kab Blitar	163	243	0,67
71	Kab Kediri	163	243	0,67
72	Kab Malang	169	243	0,70
73	Kab Lumajang	186	243	0,77
74	Kab Banyuwangi	199	243	0,82
75	Kab Bondowoso	166	243	0,68

76	Kab Situbondo	156	243	0,64
77	Kab Probolinggo	173	243	0,71
78	Kab Pasuruan	164	243	0,67
79	Kab Sidoarjo	163	243	0,67
80	Kab Mojokerto	179	243	0,74
81	Kab Jombang	169	243	0,70
82	Kab Nganjuk	176	243	0,72
83	Kab Madiun	180	243	0,74
84	Kab Magetan	164	243	0,67
85	Kab Ngawi	193	243	0,79
86	Kab Bojonegoro	167	243	0,69
87	Kab Tuban	174	243	0,72
88	Kab Lamongan	169	243	0,70
89	Kab Gresik	181	243	0,74
90	Kab Bangkalan	172	243	0,71
91	Kab Sampang	181	243	0,74
92	Kab Pamekasan	171	243	0,70
93	Kab Sumenep	180	243	0,74
94	Kota Kediri	165	243	0,68
95	Kota Blitar	172	243	0,71
96	Kota Malang	181	243	0,74
97	Kota Probolinggo	174	243	0,72
98	Kota pasuruan	166	243	0,68
99	Kota Mojokerto	164	243	0,67
100	Kota Madiun	159	243	0,65
101	Kota Surabaya	180	243	0,74
102	Kota Batu	170	243	0,70
103	Kab Pandeglang	182	243	0,75
104	Kab Lebak	160	243	0,66
105	Kab Tangerang	156	243	0,64
106	Kab Serang	163	243	0,67
107	Kota Tangerang	164	243	0,67
108	Kota Cilegon	151	243	0,62
109	Kota Serang	144	243	0,59
110	Kota Tangerang Selatan	180	243	0,74

Lampiran 3

Jumlah Anggota DPRD

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPRD
1	Kab Sukabumi	50
2	kab Bogor	50
3	kab Bandung	50
4	Kab Garut	50
5	Kab Tasikmalaya	50
6	Kab Ciamis	50
7	kab Kuningan	50
8	Kab Cirebon	50
9	Kab Majalengka	50
10	Kab Sumedang	50
11	Kab Indramayu	50
12	Kab Subang	50
13	Kab Purwakarta	44
14	Kab Karawang	50
15	Kab Bekasi	50
16	Kab Bandung Barat	50
17	Kab Pangandaran	35
18	Kota Bogor	45
19	Kota Sukabumi	34
20	Kota Bandung	50
21	Kota Cirebon	35
22	Kota Bekasi	48
23	Kota Depok	50
24	Kota tasikmalaya	45
25	Kota Banjar	25
26	Kab Cilacap	50
27	Kab Banyumas	50
28	Kab Purbalingga	55
29	Kab Banjarnegara	45
30	Kab Kebumen	50
31	Kab Purworejo	45
32	Kab Wonosobo	45
33	Kab Magelang	50
34	Kab Boyolali	45

35	Kab Klaten	50
36	Kab Sukoharjo	45
37	Kab Wonogiri	45
38	Kab Karanganyar	45
39	Kab Sragen	45
40	Kab Grobogan	50
41	Kab Blora	45
42	Kab Rembang	45
43	Kab Pati	50
44	Kab Kudus	45
45	Kab Jepara	50
46	Kab Demak	50
47	Kab Semarang	45
48	Kab Temanggung	45
49	Kab Kendal	45
50	Kab Batang	45
51	Kab Pekalongan	45
52	Kab Pemasang	50
53	Kab Tegal	50
54	Kab Brebes	50
55	Kota Magelang	25
56	Kota Surakarta	41
57	Kota Salatiga	25
58	Kota Semarang	50
59	Kota Pekalongan	30
60	Kota Tegal	30
61	Kab Kulon Progo	40
62	Kab bantul	45
63	Kab Gunung Kidul	45
64	Kab Sleman	50
65	Kota Yogyakarta	40
66	Kab Pacitan	40
67	Kab Ponorogo	44
68	Kab Trenggalek	45
69	Kab Tulungagung	50
70	Kab Blitar	50
71	Kab Kediri	50
72	Kab Malang	50
73	Kab Lumajang	50
74	Kab Banyuwangi	50
75	Kab Bondowoso	45
76	Kab Situbondo	45
77	Kab Probolinggo	45

78	Kab Pasuruan	50
79	Kab Sidoarjo	50
80	Kab Mojokerto	50
81	Kab Jombang	50
82	Kab Nganjuk	45
83	Kab Madiun	45
84	Kab Magetan	45
85	Kab Ngawi	45
86	Kab Bojonegoro	50
87	Kab Tuban	50
88	Kab Lamongan	50
89	Kab Gresik	50
90	Kab Bangkalan	49
91	Kab Sampang	45
92	Kab Pamekasan	45
93	Kab Sumenep	49
94	Kota Kediri	30
95	Kota Blitar	25
96	Kota Malang	45
97	Kota Probolinggo	30
98	Kota pasuruan	30
99	Kota Mojokerto	25
100	Kota Madiun	30
101	Kota Surabaya	50
102	Kota Batu	25
103	Kab Pandeglang	50
104	Kab Lebak	46
105	Kab Tangerang	50
106	Kab Serang	50
107	Kota Tangerang	50
108	Kota Cilegon	35
109	Kota Serang	45
110	Kota Tangerang Selatan	50

Lampiran 4

Jumlah Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Kab Sukabumi	594
2	kab Bogor	2155
3	kab Bandung	2103
4	Kab Garut	848
5	Kab Tasikmalaya	686
6	Kab Ciamis	840
7	kab Kuningan	968
8	Kab Cirebon	2210
9	Kab Majalengka	996
10	Kab Sumedang	757
11	Kab Indramayu	843
12	Kab Subang	834
13	Kab Purwakarta	1155
14	Kab Karawang	1414
15	Kab Bekasi	2964
16	Kab Bandung Barat	1289
17	Kab Pangandaran	393
18	Kota Bogor	9256
19	Kota Sukabumi	6762
20	Kota Bandung	14932
21	Kota Cirebon	8466
22	Kota Bekasi	14190
23	Kota Depok	11635
24	Kota tasikmalaya	3862
25	Kota Banjar	1611
26	Kab Cilacap	804
27	Kab Banyumas	1265
28	Kab Purbalingga	1190
29	Kab Banjarnegara	858
30	Kab Kebumen	932
31	Kab Purworejo	692
32	Kab Wonosobo	800
33	Kab Magelang	1179
34	Kab Boyolali	965
35	Kab Klaten	1787

36	Kab Sukoharjo	1897
37	Kab Wonogiri	525
38	Kab Karanganyar	1138
39	Kab Sragen	938
40	Kab Grobogan	694
41	Kab Blora	480
42	Kab Rembang	625
43	Kab Pati	840
44	Kab Kudus	2026
45	Kab Jepara	1235
46	Kab Demak	1283
47	Kab Semarang	1099
48	Kab Temanggung	880
49	Kab Kendal	962
50	Kab Batang	966
51	Kab Pekalongan	1067
52	Kab Pemasang	1284
53	Kab Tegal	1634
54	Kab Brebes	1088
55	Kota Magelang	6726
56	Kota Surakarta	11762
57	Kota Salatiga	3617
58	Kota Semarang	4780
59	Kota Pekalongan	6772
60	Kota Tegal	7220
61	Kab Kulon Progo	727
62	Kab bantul	1986
63	Kab Gunung Kidul	496
64	Kab Sleman	2099
65	Kota Yogyakarta	13359
66	Kab Pacitan	399
67	Kab Ponorogo	667
68	Kab Trenggalek	606
69	Kab Tulungagung	980
70	Kab Blitar	866
71	Kab Kediri	1131
72	Kab Malang	734
73	Kab Lumajang	581
74	Kab Banyuwangi	278
75	Kab Bondowoso	506
76	Kab Situbondo	407

77	Kab Probolinggo	685
78	Kab Pasuruan	1097
79	Kab Sidoarjo	3495
80	Kab Mojokerto	1545
81	Kab Jombang	1129
82	Kab Nganjuk	859
83	Kab Madiun	656
84	Kab Magetan	913
85	Kab Ngawi	640
86	Kab Bojonegoro	567
87	Kab Tuban	637
88	Kab Lamongan	667
89	Kab Gresik	1090
90	Kab Bangkalan	978
91	Kab Sampang	786
92	Kab Pamekasan	1099
93	Kab Sumenep	543
94	Kota Kediri	4511
95	Kota Blitar	4329
96	Kota Malang	5961
97	Kota Probolinggo	4147
98	Kota pasuruan	5639
99	Kota Mojokerto	7772
100	Kota Madiun	5218
101	Kota Surabaya	8233
102	Kota Batu	1507
103	Kab Pandeglang	440
104	Kab Lebak	378
105	Kab Tangerang	3649
106	Kab Serang	866
107	Kota Tangerang	14197
108	Kota Cilegon	2458
109	Kota Serang	2541
110	Kota Tangerang Selatan	11525

Lampiran 5

Pelatihan Pengelolaan Keuangan

No	Kabupaten/Kota	Pelatihan
1	Kab Sukabumi	1
2	kab Bogor	1
3	kab Bandung	1
4	Kab Garut	0
5	Kab Tasikmalaya	1
6	Kab Ciamis	0
7	kab Kuningan	1
8	Kab Cirebon	0
9	Kab Majalengka	1
10	Kab Sumedang	0
11	Kab Indramayu	0
12	Kab Subang	1
13	Kab Purwakarta	0
14	Kab Karawang	1
15	Kab Bekasi	0
16	Kab Bandung Barat	1
17	Kab Pangandaran	0
18	Kota Bogor	1
19	Kota Sukabumi	1
20	Kota Bandung	1
21	Kota Cirebon	0
22	Kota Bekasi	1
23	Kota Depok	1
24	Kota tasikmalaya	1
25	Kota Banjar	0
26	Kab Cilacap	1
27	Kab Banyumas	1
28	Kab Purbalingga	1
29	Kab Banjarnegara	1
30	Kab Kebumen	0
31	Kab Purworejo	1
32	Kab Wonosobo	0
33	Kab Magelang	1
34	Kab Boyolali	1
35	Kab Klaten	1

36	Kab Sukoharjo	1
37	Kab Wonogiri	1
38	Kab Karanganyar	1
39	Kab Sragen	1
40	Kab Grobogan	1
41	Kab Blora	1
42	Kab Rembang	0
43	Kab Pati	1
44	Kab Kudus	1
45	Kab Jepara	1
46	Kab Demak	1
47	Kab Semarang	0
48	Kab Temanggung	1
49	Kab Kendal	0
50	Kab Batang	1
51	Kab Pekalongan	1
52	Kab Pemasang	1
53	Kab Tegal	1
54	Kab Brebes	1
55	Kota Magelang	1
56	Kota Surakarta	1
57	Kota Salatiga	0
58	Kota Semarang	0
59	Kota Pekalongan	1
60	Kota Tegal	1
61	Kab Kulon Progo	1
62	Kab bantul	0
63	Kab Gunung Kidul	1
64	Kab Sleman	1
65	Kota Yogyakarta	0
66	Kab Pacitan	1
67	Kab Ponorogo	1
68	Kab Trenggalek	0
69	Kab Tulungagung	1
70	Kab Blitar	1
71	Kab Kediri	1
72	Kab Malang	1
73	Kab Lumajang	0
74	Kab Banyuwangi	0
75	Kab Bondowoso	1
76	Kab Situbondo	1

77	Kab Probolinggo	1
78	Kab Pasuruan	1
79	Kab Sidoarjo	1
80	Kab Mojokerto	1
81	Kab Jombang	1
82	Kab Nganjuk	1
83	Kab Madiun	1
84	Kab Magetan	1
85	Kab Ngawi	1
86	Kab Bojonegoro	0
87	Kab Tuban	1
88	Kab Lamongan	1
89	Kab Gresik	1
90	Kab Bangkalan	1
91	Kab Sampang	0
92	Kab Pamekasan	1
93	Kab Sumenep	0
94	Kota Kediri	0
95	Kota Blitar	0
96	Kota Malang	1
97	Kota Probolinggo	1
98	Kota pasuruan	1
99	Kota Mojokerto	1
100	Kota Madiun	0
101	Kota Surabaya	0
102	Kota Batu	1
103	Kab Pandeglang	1
104	Kab Lebak	1
105	Kab Tangerang	1
106	Kab Serang	0
107	Kota Tangerang	1
108	Kota Cilegon	1
109	Kota Serang	1
110	Kota Tangerang Selatan	0

Lampiran 6

Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

No	Kabupaten/Kota	LB pendidikan kepala daerah
1	Kab Sukabumi	1
2	kab Bogor	1
3	kab Bandung	0
4	Kab Garut	0
5	Kab Tasikmalaya	1
6	Kab Ciamis	1
7	kab Kuningan	0
8	Kab Cirebon	1
9	Kab Majalengka	1
10	Kab Sumedang	1
11	Kab Indramayu	0
12	Kab Subang	1
13	Kab Purwakarta	1
14	Kab Karawang	0
15	Kab Bekasi	0
16	Kab Bandung Barat	0
17	Kab Pangandaran	0
18	Kota Bogor	0
19	Kota Sukabumi	0
20	Kota Bandung	0
21	Kota Cirebon	0
22	Kota Bekasi	0
23	Kota Depok	0
24	Kota tasikmalaya	0
25	Kota Banjar	0
26	Kab Cilacap	0
27	Kab Banyumas	0
28	Kab Purbalingga	1
29	Kab Banjarnegara	0
30	Kab Kebumen	0
31	Kab Purworejo	1
32	Kab Wonosobo	1
33	Kab Magelang	0

34	Kab Boyolali	0
35	Kab Klaten	0
36	Kab Sukoharjo	0
37	Kab Wonogiri	0
38	Kab Karanganyar	1
39	Kab Sragen	0
40	Kab Grobogan	1
41	Kab Blora	0
42	Kab Rembang	0
43	Kab Pati	1
44	Kab Kudus	0
45	Kab Jepara	1
46	Kab Demak	0
47	Kab Semarang	0
48	Kab Temanggung	0
49	Kab Kendal	0
50	Kab Batang	0
51	Kab Pekalongan	0
52	Kab Pemasang	1
53	Kab Tegal	0
54	Kab Brebes	1
55	Kota Magelang	1
56	Kota Surakarta	0
57	Kota Salatiga	1
58	Kota Semarang	1
59	Kota Pekalongan	1
60	Kota Tegal	1
61	Kab Kulon Progo	0
62	Kab bantul	0
63	Kab Gunung Kidul	0
64	Kab Sleman	0
65	Kota Yogyakarta	0
66	Kab Pacitan	1
67	Kab Ponorogo	0
68	Kab Trenggalek	1
69	Kab Tulungagung	1
70	Kab Blitar	1
71	Kab Kediri	0
72	Kab Malang	1
73	Kab Lumajang	0
74	Kab Banyuwangi	0

75	Kab Bondowoso	0
76	Kab Situbondo	0
77	Kab Probolinggo	1
78	Kab Pasuruan	1
79	Kab Sidoarjo	0
80	Kab Mojokerto	0
81	Kab Jombang	0
82	Kab Nganjuk	1
83	Kab Madiun	0
84	Kab Magetan	0
85	Kab Ngawi	0
86	Kab Bojonegoro	0
87	Kab Tuban	0
88	Kab Lamongan	1
89	Kab Gresik	0
90	Kab Bangkalan	0
91	Kab Sampang	0
92	Kab Pamekasan	0
93	Kab Sumenep	0
94	Kota Kediri	1
95	Kota Blitar	1
96	Kota Malang	0
97	Kota Probolinggo	1
98	Kota pasuruan	0
99	Kota Mojokerto	1
100	Kota Madiun	1
101	Kota Surabaya	0
102	Kota Batu	0
103	Kab Pandeglang	1
104	Kab Lebak	1
105	Kab Tangerang	1
106	Kab Serang	1
107	Kota Tangerang	0
108	Kota Cilegon	0
109	Kota Serang	0
110	Kota Tangerang Selatan	0

Lampiran 7

Umur Administrasi Pemerintahan Daerah

No	Kabupaten/Kota	Umur administratif PEMDA
1	Kab Sukabumi	68
2	kab Bogor	68
3	kab Bandung	68
4	Kab Garut	68
5	Kab Tasikmalaya	68
6	Kab Ciamis	68
7	kab Kuningan	68
8	Kab Cirebon	68
9	Kab Majalengka	68
10	Kab Sumedang	68
11	Kab Indramayu	68
12	Kab Subang	50
13	Kab Purwakarta	68
14	Kab Karawang	68
15	Kab Bekasi	68
16	Kab Bandung Barat	11
17	Kab Pangandaran	6
18	Kota Bogor	68
19	Kota Sukabumi	68
20	Kota Bandung	68
21	Kota Cirebon	68
22	Kota Bekasi	22
23	Kota Depok	19
24	Kota tasikmalaya	42
25	Kota Banjar	16
26	Kab Cilacap	68
27	Kab Banyumas	68
28	Kab Purbalingga	68
29	Kab Banjarnegara	68
30	Kab Kebumen	68
31	Kab Purworejo	68
32	Kab Wonosobo	68
33	Kab Magelang	68
34	Kab Boyolali	68

35	Kab Klaten	68
36	Kab Sukoharjo	68
37	Kab Wonogiri	68
38	Kab Karanganyar	68
39	Kab Sragen	68
40	Kab Grobogan	68
41	Kab Blora	68
42	Kab Rembang	68
43	Kab Pati	68
44	Kab Kudus	68
45	Kab Jepara	68
46	Kab Demak	68
47	Kab Semarang	68
48	Kab Temanggung	68
49	Kab Kendal	68
50	Kab Batang	53
51	Kab Pekalongan	68
52	Kab Pemasang	68
53	Kab Tegal	68
54	Kab Brebes	68
55	Kota Magelang	68
56	Kota Surakarta	68
57	Kota Salatiga	68
58	Kota Semarang	68
59	Kota Pekalongan	68
60	Kota Tegal	68
61	Kab Kulon Progo	68
62	Kab bantul	68
63	Kab Gunung Kidul	23
64	Kab Sleman	68
65	Kota Yogyakarta	68
66	Kab Pacitan	68
67	Kab Ponorogo	68
68	Kab Trenggalek	68
69	Kab Tulungagung	68
70	Kab Blitar	68
71	Kab Kediri	68
72	Kab Malang	68
73	Kab Lumajang	68
74	Kab Banyuwangi	68
75	Kab Bondowoso	68

76	Kab Situbondo	46
77	Kab Probolinggo	68
78	Kab Pasuruan	68
79	Kab Sidoarjo	68
80	Kab Mojokerto	68
81	Kab Jombang	68
82	Kab Nganjuk	68
83	Kab Madiun	68
84	Kab Magetan	68
85	Kab Ngawi	68
86	Kab Bojonegoro	68
87	Kab Tuban	68
88	Kab Lamongan	68
89	Kab Gresik	44
90	Kab Bangkalan	68
91	Kab Sampang	68
92	Kab Pamekasan	68
93	Kab Sumenep	68
94	Kota Kediri	68
95	Kota Blitar	68
96	Kota Malang	68
97	Kota Probolinggo	68
98	Kota pasuruan	68
99	Kota Mojokerto	68
100	Kota Madiun	68
101	Kota Surabaya	68
102	Kota Batu	17
103	Kab Pandeglang	68
104	Kab Lebak	68
105	Kab Tangerang	68
106	Kab Serang	68
107	Kota Tangerang	25
108	Kota Cilegon	19
109	Kota Serang	11
110	Kota Tangerang Selatan	10

Lampiran 8

Temuan Audit

No	Kabupaten/Kota	Temuan Audit
1	Kab Sukabumi	4
2	kab Bogor	6
3	kab Bandung	4
4	Kab Garut	3
5	Kab Tasikmalaya	3
6	Kab Ciamis	3
7	kab Kuningan	2
8	Kab Cirebon	3
9	Kab Majalengka	3
10	Kab Sumedang	3
11	Kab Indramayu	4
12	Kab Subang	3
13	Kab Purwakarta	4
14	Kab Karawang	4
15	Kab Bekasi	3
16	Kab Bandung Barat	3
17	Kab Pangandaran	5
18	Kota Bogor	4
19	Kota Sukabumi	3
20	Kota Bandung	4
21	Kota Cirebon	3
22	Kota Bekasi	4
23	Kota Depok	5
24	Kota tasikmalaya	2
25	Kota Banjar	2
26	Kab Cilacap	2
27	Kab Banyumas	2
28	Kab Purbalingga	2
29	Kab Banjarnegara	4
30	Kab Kebumen	2
31	Kab Purworejo	3
32	Kab Wonosobo	2
33	Kab Magelang	2
34	Kab Boyolali	2
35	Kab Klaten	2

36	Kab Sukoharjo	2
37	Kab Wonogiri	2
38	Kab Karanganyar	3
39	Kab Sragen	2
40	Kab Grobogan	2
41	Kab Blora	3
42	Kab Rembang	2
43	Kab Pati	2
44	Kab Kudus	2
45	Kab Jepara	1
46	Kab Demak	2
47	Kab Semarang	1
48	Kab Temanggung	2
49	Kab Kendal	1
50	Kab Batang	3
51	Kab Pekalongan	2
52	Kab Pemasang	3
53	Kab Tegal	2
54	Kab Brebes	4
55	Kota Magelang	2
56	Kota Surakarta	1
57	Kota Salatiga	2
58	Kota Semarang	3
59	Kota Pekalongan	2
60	Kota Tegal	2
61	Kab Kulon Progo	5
62	Kab bantul	3
63	Kab Gunung Kidul	2
64	Kab Sleman	6
65	Kota Yogyakarta	6
66	Kab Pacitan	2
67	Kab Ponorogo	2
68	Kab Trenggalek	2
69	Kab Tulungagung	1
70	Kab Blitar	2
71	Kab Kediri	3
72	Kab Malang	2
73	Kab Lumajang	4
74	Kab Banyuwangi	3
75	Kab Bondowoso	2
76	Kab Situbondo	3

77	Kab Probolinggo	2
78	Kab Pasuruan	5
79	Kab Sidoarjo	2
80	Kab Mojokerto	3
81	Kab Jombang	6
82	Kab Nganjuk	3
83	Kab Madiun	3
84	Kab Magetan	4
85	Kab Ngawi	5
86	Kab Bojonegoro	6
87	Kab Tuban	5
88	Kab Lamongan	3
89	Kab Gresik	3
90	Kab Bangkalan	3
91	Kab Sampang	2
92	Kab Pamekasan	2
93	Kab Sumenep	1
94	Kota Kediri	3
95	Kota Blitar	2
96	Kota Malang	2
97	Kota Probolinggo	2
98	Kota pasuruan	3
99	Kota Mojokerto	4
100	Kota Madiun	3
101	Kota Surabaya	2
102	Kota Batu	3
103	Kab Pandeglang	8
104	Kab Lebak	1
105	Kab Tangerang	4
106	Kab Serang	3
107	Kota Tangerang	4
108	Kota Cilegon	5
109	Kota Serang	8
110	Kota Tangerang Selatan	6

Lampiran 9

Intergovernmental Revenue

No	Kabupaten/Kota	<i>Intergovernmental Revenue</i>		
		INGOV (1)	Total Pendapatan (2)	(1)/(2)
1	Kab Sukabumi	1964152558	3762186754	0,522
2	kab Bogor	2818814498	7300466121	0,386
3	kab Bandung	3137666226	5259974811	0,597
4	Kab Garut	2625652140	4301343516	0,610
5	Kab Tasikmalaya	2067009181	3557974396	0,581
6	Kab Ciamis	1627548415	2573609422	0,632
7	kab Kuningan	1662033403	2529670839	0,657
8	Kab Cirebon	2070427929	3683068267	0,562
9	Kab Majalengka	1668010125	2817585063	0,592
10	Kab Sumedang	1638676633	2749911575	0,596
11	Kab Indramayu	1988742977	3338765617	0,596
12	Kab Subang	1867788293	2841063281	0,657
13	Kab Purwakarta	1220987188	2060667874	0,593
14	Kab Karawang	2048785690	4188371978	0,489
15	Kab Bekasi	1903321885	5194984158	0,366
16	Kab Bandung Barat	1525369449	2602111488	0,586
17	Kab Pangandaran	787754579	1137227065	0,693
18	Kota Bogor	1066762734	2328703433	0,458
19	Kota Sukabumi	688216742	1223767357	0,562
20	Kota Bandung	2427237816	5939997423	0,409
21	Kota Cirebon	814145270	1422710787	0,572
22	Kota Bekasi	1653956945	4835980257	0,342
23	Kota Depok	1158659584	2940266487	0,394
24	Kota tasikmalaya	1145172888	1837915314	0,623
25	Kota Banjar	505143732	799959797	0,631
26	Kab Cilacap	1893593644	3049351736	0,621
27	Kab Banyumas	1894413015	3265926652	0,580
28	Kab Purbalingga	1240574232	1948442029	0,637
29	Kab Banjarnegara	1354080375	2074653162	0,653
30	Kab Kebumen	1654135304	2639732829	0,627
31	Kab Purworejo	1264233475	2050879036	0,616
32	Kab Wonosobo	1139805206	1851441024	0,616
33	Kab Magelang	1398132842	2302190544	0,607

34	Kab Boyolali	1438528619	2227780710	0,646
35	Kab Klaten	1662130955	2545432179	0,653
36	Kab Sukoharjo	1219811099	2055517964	0,593
37	Kab Wonogiri	1532139685	2298176601	0,667
38	Kab Karanganyar	1325732298	2113929232	0,627
39	Kab Sragen	1405508763	2176997512	0,646
40	Kab Grobogan	1520822496	2439501262	0,623
41	Kab Blora	1375550409	2439501262	0,564
42	Kab Rembang	1071215247	1794911075	0,597
43	Kab Pati	1637310968	2750282961	0,595
44	Kab Kudus	1281771375	1996530094	0,642
45	Kab Jepara	1339634293	2255843022	0,594
46	Kab Demak	1205186811	2143306259	0,562
47	Kab Semarang	1307508473	2117416567	0,618
48	Kab Temanggung	1069110356	1731235867	0,618
49	Kab Kendal	1299802799	2138513509	0,608
50	Kab Batang	1048707119	1701877299	0,616
51	Kab Pekalongan	1288217218	2101449302	0,613
52	Kab Pemasang	1542918674	2428263886	0,635
53	Kab Tegal	1513203330	2524365920	0,599
54	Kab Brebes	1753057931	2854043939	0,614
55	Kota Magelang	570455641	908089486	0,628
56	Kota Surakarta	1090922294	1879056017	0,581
57	Kota Salatiga	561012928	889992411	0,630
58	Kota Semarang	1689237452	4234394211	0,399
59	Kota Pekalongan	586379795	905231573	0,648
60	Kota Tegal	602567259	905231573	0,666
61	Kab Kulon Progo	973566098	1559832133	0,624
62	Kab bantul	1355455930	2227752027	0,608
63	Kab Gunung Kidul	1264791667	1851209930	0,683
64	Kab Sleman	1368717994	2712794080	0,505
65	Kota Yogyakarta	867706456	1736919998	0,500
66	Kab Pacitan	1170405463	1788495524	0,654
67	Kab Ponorogo	1552016044	2308325807	0,672
68	Kab Trenggalek	1277893727	1824359680	0,700
69	Kab Tulungagung	1701678500	2701521943	0,630
70	Kab Blitar	1599499305	2352130150	0,680
71	Kab Kediri	1769048285	2867950508	0,617
72	Kab Malang	2413067750	3826724069	0,631
73	Kab Lumajang	1390713615	2077396056	0,669
74	Kab Banyuwangi	1960992383	2997644018	0,654

75	Kab Bondowoso	1336039554	2094948617	0,638
76	Kab Situbondo	1227769852	1755587299	0,699
77	Kab Probolinggo	1395763926	2186552598	0,638
78	Kab Pasuruan	1858320669	3187963234	0,583
79	Kab Sidoarjo	1793474342	4332610235	0,414
80	Kab Mojokerto	1610116976	2434259982	0,661
81	Kab Jombang	1559258761	2512786629	0,621
82	Kab Nganjuk	1529562444	2369549961	0,646
83	Kab Madiun	1286346822	1829582126	0,703
84	Kab Magetan	1280133487	1828792472	0,700
85	Kab Ngawi	1486134020	2078098740	0,715
86	Kab Bojonegoro	3814660801	4823752241	0,791
87	Kab Tuban	1493217733	2455664335	0,608
88	Kab Lamongan	1700714352	2811062543	0,605
89	Kab Gresik	1425168417	2876343695	0,495
90	Kab Bangkalan	1344825042	2074411905	0,648
91	Kab Sampang	1212116501	1697685707	0,714
92	Kab Pamekasan	1252406756	1840978455	0,680
93	Kab Sumenep	1601302418	2243989569	0,714
94	Kota Kediri	880243892	1282419734	0,686
95	Kota Blitar	626534718	894409018	0,701
96	Kota Malang	1181289820	2040194241	0,579
97	Kota Probolinggo	666819342	987611167	0,675
98	Kota pasuruan	649988532	903243732	0,720
99	Kota Mojokerto	553125342	887452801	0,623
100	Kota Madiun	678417066	1007446240	0,673
101	Kota Surabaya	2088869969	8175204580	0,256
102	Kota Batu	649243672	984947474	0,659
103	Kab Pandeglang	1621594434	2362130983	0,686
104	Kab Lebak	1539049051	2504432440	0,615
105	Kab Tangerang	1758969673	5483110414	0,321
106	Kab Serang	1546651981	2918628102	0,530
107	Kota Tangerang	1341676525	3971571450	0,338
108	Kota Cilegon	841804103	1630020025	0,516
109	Kota Serang	735561644	1242437572	0,592
110	Kota Tangerang Selatan	889139727	3211105498	0,277

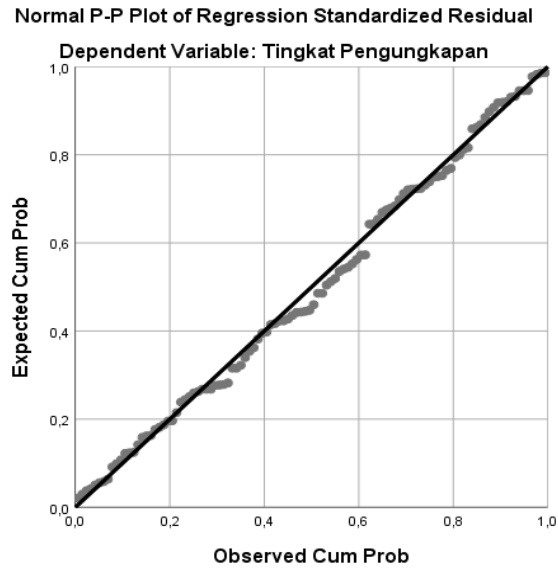
LAMPIRAN 10

Hasil Uji dan Regresi

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah DPRD	110	25	55	45,05	7,219
Jumlah Penduduk	110	278	14932	2639,56	3405,123
Pelatihan	110	0	1	,72	,452
Latar Belakang Pendidikan Kepala daerah	110	0	1	,37	,486
Umur Administratif Pemda	110	6	68	61,87	16,016
Temuan Audit	110	1	8	3,02	1,408
<i>Intergovernmental revenue</i>	110	,26	,79	,5975	,09789
Tingkat Pengungkapan Wajib	110	,59	,84	,7039	,04555

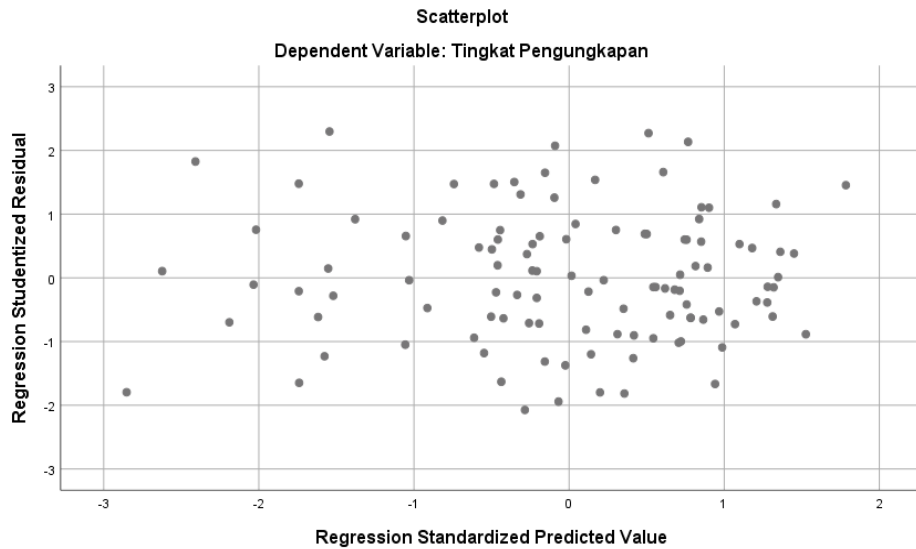
2. Uji Normalitas



3. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah DPRD	,455	2,198
	Jumlah Penduduk	,379	2,638
	Pelatihan	,970	1,031
	Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	,871	1,148
	Umur Administratif Pemda	,730	1,370
	Temuan Audit	,847	1,180
	<i>Intergovernmental Revenue</i>	,384	2,603

4. Uji Heterokedastisitas



5. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,669	,190		3,520	,001
	Jumlah DPRD	,006	,034	,026	,187	,852
	Jumlah Penduduk	-,007	,007	-,146	-,953	,343
	Pelatihan	-,007	,010	-,067	-,700	,485
	Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah	-,017	,010	-,184	-1,824	,071
	Umur Administratif Pemda	,023	,011	,239	2,177	,032
	Temuan Audit	-,001	,003	-,026	-,259	,796
	<i>Intergovernmental Revenue</i>	-,031	,071	-,067	-,441	,660

6. Uji Koeffisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,315 ^a	,099	,038	,04521
a. Predictors: (Constant), <i>Intergovernmental Revenue</i> , Pelatihan, Latar Belakang Pendidikan Kepala daerah, Temuan Audit, Jumlah DPRD, Umur Administratif Pemda, Jumlah Penduduk				
b. Dependen Variabel: Tingkat Pengungkapan Wajib				

